# BAB IV

# HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## 4.1 Gambaran Umum Pemerintah kota Bandung

### 4.1.1 Sejarah Pemerintahan Kota Bandung

Kota Bandung terletak di wilayah Jawa Barat dan merupakan Ibukota Propinsi Jawa Barat. Kota Bandung secara geografis terletak antara 107° bujur timur dan 6°55' lintang selatan dan secara administratif terdiri dari 26 kecamatan. Kota ini dikelilingi oleh kabupaten Bandung dan terletak pada lokasi yang strategis dilihat dari segi komunikasi, perekonomian maupun keamanan. Posisinya pada poros jalan raya barat-timur yang memudahkan hubungan dengan ibukota Jakarta, dan utara-selatan yang memudahkan akses ke daerah perkebunan di Subang dan Pengalengan, letaknya yang tidak terisolasi, dan jalur komunikasinya baik dan Iklim kota ini merupakan iklim pegunungan yang lembab dan sejuk.

Kantor Pemerintahan Kota Bandung berpusat di Jl. Wastukencana No. 2 Bandung, Jawa Barat. Dipimpin oleh H. Dada Rosada, S.H., M.Si sebagai Walikota Bandung, Pemerintahan Kota Bandung memiliki visi dan misi yang ingin membangun dan memajukan Kota Bandung. Kota Bandung memiliki 17 Dinas yang terdiri dari :

1. Dinas Pendidikan
2. Dinas Kesehatan
3. Dinas Sosial
4. Dinas Tenaga Kerja

5. Dinas Perhubungan
6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
7. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
8. Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya
9. Dinas Bina Marga dan Pengairan
10. Dinas Pemakaman dan Pertamanan
11. Dinas Kebakaran
12. Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Perdagangan
13. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
14. Dinas Pendapatan
15. Dinas Komunikasi dan Informatika
16. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
17. Dinas Pemuda dan Olah Raga

### 4.1.2. Struktur Organisasi Pemerintah Kota Bandung

Struktur organisasi merupakan suatu gambaran secara skematik tentang bagian-bagian dan tugas-tugas, tanggung jawab serta hubungan bagian yang terdapat dalam suatu badan atau suatu lembaga. Adapun tujuan mengorganisisr salah satunya adalah untuk mempermudah pelaksanaan tugas, membagi-bagi suatu tugas kegiatan besar menjadi beberapa kegiatan.

Sesuai dengan peraturan daerah kota Bandung No.03 tahun 2001 tentang pembentukan dan susunan organisasi sekretariat daerah kota Bandung maka di

bawah ini akan diuraikan secara singkat struktur organisasi pemerintah kota Bandung sebagai berikut :

1. Walikota
2. Wakil walikota, terdiri dari :
    1. Sekretaris daerah
    2. Asisten tata praja, terdiri dari :
        a. Bagian bina pemerintahan dan otonomi daerah, yang membawahi :
            - Sub bagian pengembangan otonomi daerah
            - Sub bagian bina pemerintah kecamatan
            - Sub bagian bina pemerintah kelurahan
            - Sub bagian hubungan antar lembaga
        b. Bagian hukum, membawahi :
            - Sub bagian peraturan perundang-undangan
            - Sub bagian bantuan hukum
            - Sub bagian administrasi dan bantuan hukum
            - Sub bagian pengkajian dan evaluasi
        c. Bagian organisasi, membawahi :
            - Sub bagian kelembagaan
            - Sub bagian ketatalaksanaan
            - Sub bagian analisa formasi jabatan
            - Sub bagian data dan sistem informasi
3. Asisten ekonomi pembangunan dan kesejahteraan rakyat, terdiri dari :
    a. Bagian ekonomi, membawahi :

- Sub bagian bina produksi dan distribusi
- Sub bagian sarana dan prasarana ekonomi
- Sub bagian administrasi pendayagunaan BUMD

b. Bagian pembangunan, membawahi :

- Sub bagian penyusunan program
- Sub bagian administrasi pengendalian program
- Sub bagian evaluasi dan pelaporan

c. Bagian kesejahteraan rakyat, membawahi :

- Sub bagian kesejahteraan sosial
- Sub bagian bintal dan agama
- Sub bagian pemuda dan olahraga

d. Bagian pemberdayaan perempuan, membawahi :

- Sub bagian analisa kebijakan pemberdayaan perempuan
- Sub bagian pemberdayaan dan partisipasi peran serta masyarakat dan organisasi perempuan
- Sub bagian evaluasi dan pelaporan

4. Asisten administrasi, terdiri dari :

a. Bagian keuangan, membawahi :

- Sub bagian anggaran
- Sub bagian perbendaharaan
- Sub bagian verifikasi
- Sub bagian belanja pegawai
- Sub bagian pembukuan

b. Bagian kepegawaian, membawahi :

- Sub bagian umum kepegawaian
- Sub bagian mutasi pegawai
- Sub bagian pengembangan karir

c. Bagian umum, membawahi :

- Sub bagian tata usaha pimpinan dan keuangan sekretariat
- Sub bagian rumah tangga
- Sub bagian protokol
- Sub bagian sandi dan telekomunikasi

d. Bagian perlengkapan, membawahi :

- Sub bagian inventarisasi dan analisa kebutuhan
- Sub bagian administrasi dan pengadaan
- Sub bagian penyimpanan aset daerah

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran tentang Struktur Organisasi Pemerintah Kota Bandung.

### 4.1.3. *Job Description*

1) Dinas Pendidikan

Merupakan dinas yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pembangunan di bidang pendidikan yang mengacu pada peningkatan SDM.

2) Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan merupakan salah satu SKPD di lingkungan pemerintah Kota Bandung yang bertanggung jawab dalam bidang pembangunan Kesehatan

3) Dinas Sosial

Melaksanakan kewenangan daerah di bidang sosial. Pelaksanaan tuga steknis operasional bidang sosial yang meliputi binas sosial, pelayanan sosial, rehabilitasi sosial, dan keluarga sejahtera ;

4) Dinas Tenaga Kerja

Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung merupakan suatu lembaga Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang mengemban tugas di bidang ketenagakerjaan.

5) Dinas Perhubungan

Melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah di bidang Perhubungan berdasarkan asas otonomi dan pembantuan.

6) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian Kewenangan Daerah dibidang Kependudukan.

7) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Merencanakan, membina, mengkoordinasikan, mengevaluasi, dan mengendalikan kegiatan pariwisata dan kebudayan dalam bidang sarana wisata, objek wisata, pemasaran wisata, kebudayaan, kesenian, dan ketatausahaan dinas.

8) Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya

Dinas Tata Kota mempunyai fungsi: pertama, merumuskan kebijakan teknis bidang tata ruang kota, kedua, melaksanakan tugas operaasional bidang tata kota yang meliputi survey dan pemetaan, perencanaan tata ruang kota dan perizinan pemanfaatan ruang kota, dan ketiga, melaksanakan pelayanan teknis administratif meliputi administrasi umum dan keuangan serta administrasi kepegawaian dinas.

9) Dinas Bina Marga dan Pengairan

Melaksanakan sebagian kewenangan daerah di bidang pekerjaan umum

10) Dinas Pemakaman dan Pertamanan

Dinas Pertamanan dan Pemakaman merupakan gabungan dari dinas pertamanan dan pemakaman. Dinas Pemakaman dan Pertamanan memiliki tugas pokok yaitu melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang pertamanan dan fasilitas sosial serta melaksanakan tugas pembantuan yang diserahkan kepadanya oleh Walikota;

11) Dinas Kebakaran

Melaksanakan sebagian kewenangan Daerah dalam bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

12) Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Perdagangan

Melaksanakan urusan pemerintah dibidang Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan berdasarkan azas otonomi dan pembantuan.

13) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Dinas Pertanian adalah unit yang bertugas merumuskan kebijakan teknis bidang pertanian dan melaksanakan tugas teknis operasional bidang peertanian. Dinas pertanian merupakan gabungan dari dinas pertanian tanaman pangan, dinas peternakan dan dinas perikanan.

14) Dinas Pendapatan

Merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional di bidang Pendapatan yang merupakan sebagian kewenangan Daerah Kota Bandung;

15) Dinas Komunikasi dan Informatika

Melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah di bidang komunikasi, informatika dan hubungan masyarakat berdasarkan azas otonomi dan pembantuan.

16) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah yaitu di Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

17) Dinas Pemuda dan Olah Raga

Dinas Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah yaitu di bidang kepemudaan dan olahraga.

### 4.1.4 Aktivitas Perusahaan

**a. Visi Pemerintah Kota Bandung**

"TERWUJUDNYA KOTA BANDUNG SEBAGAI KOTA JASA YANG BERMARTABAT ( BERSIH, MAKMUR, TAAT DAN BERSAHABAT )"

Untuk Merealisasikan keinginan, harapan, serta tujuan sebagaimana tertuang dalam visi yang telah ditetapkan, maka pemerintah bersama elemen seluruh masyarakat Kota Bandung harus memahami akan makna dari visi tersebut yaitu :

1. Kota Bandung sebagai Kota Jasa harus bersih dari sampah, dan bersih praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( KKN ), penyakit masyarakat ( judi, pelacuran, narkoba, premanisme dan lainnya), dan perbuatan-perbuatan tercela lainnya yang bertentangan dengan moral dan agama dan budaya masyarakat atau bangsa;
2. Kota Bandung sebagai Kota Jasa yang memberikan kemakmuran bagi warganya;
3. Kota Bandung sebagai Kota Jasa harus memiliki warga yang taat terhadap agama, hukum dan aturan ? aturan yang ditetapkan untuk menjaga keamanan, kenyamanan dan ketertiban kota .
4. Kota Bandung sebagai Kota Jasa harus memiliki warga yang bersahabat, santun, akrab dan dapat menyenangkan bagi orang yang berkunjung serta menjadikan kota yang bersahabat dalam pemahaman kota yang ramah lingkungan.

Secara harfiah, Bermartabat diartikan sebagai harkat atau haraga diri, yang menunjukkan eksistensi masyarakat kota yang dapat dijadikan teladan karena kebersihan, kemakmuran, ketaatan, ketaqwaan dan kedisiplinannya.

Jadi kota jasa yang bermartabat adalah kota yang menyediakan jasa pelayanan yang didukung dengan terwujudnya kebersihan, kemakmuran, ketaatan, ketaqwaan, dan kedisiplinan masyarakatnya.

Berdasarkan pemahaman tersebut, sangatlah rasional pada kurun waktu lima tahun kedepan diperlukan langkah dan tindakan pemantapan ( revitalisasi, reaktualisasi, reorientasi dan refungsionalisasi ) yang harus dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung beserta masyarakatnya serta didukung secara politis oleh pihak legislatif melalui upaya-upaya yang lebih keras, cerdas dan terarah namun tetap ramah dalam meningkatkan akselerasi pembangunan guna tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

**b. Misi Pemerintah Kota Bandung**

Misi adalah tugas yang diemban Pemerintah Kota Bandung meliputi :

1. Mengembangkan sumber daya manusia yang handal yang religius, Yang mencakup pendidikan, kesehatan dan moral keagamaan.
2. Mengembangkan perekonomian kota yang adil, yang mencakup peningkatan perekonomian kota yang tangguh, sehat dan berkeadilan dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat, menciptakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha.
3. Mengembangkan Sosial Budaya Kota yang ramah dan berkesadran tinggi, serta berhati nurani, yang mencakup peningkatan partisipasi masyarakat

dalam rangka meningkatkan ketenagakerjaan, meningkatkan kesejahteraan sosial, keluarga, pemuda dan olah raga serta kesetaraan gender.

4. Meningkatkan penataan Kota , yang mencakup pemeliharaan serta peningkatan prasarana dan sarana kota agar sesuai dengan dinamika peningkatan kegiatan kota dengan tetap memperhatikan tata ruang kota dan daya dukung lingkungan kota .
5. Meningkatkan kinerja pemerintah kota secara professional, efektif, efisien akuntabel dan transparan, yang mencakup pemberdayaan aparatur pemerintah dan masyarakat.
6. Mengembangkan sistem keuangan kota , mencakup sistem pembiayaan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, swasta dan masyarakat.

## 4.2. Karakteristik Responden

Data responden yang berhasil dikumpulkan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebanyak 22 (dua puluh empat) orang responden, sesuai dengan ukuran sampel yang telah ditentukan dalam Bab III. Adapun data mengenai karakteristik responden dapat dilihat sebagai berikut:

### A. Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Data responden yang pertama disajikan adalah data responden dengan karakteristik berdasarkan jenis kelamin. Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 4.1.

**Tabel 4.1**
**Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**

| Jenis Kelamin | ∑ Responden | Persentase (%) |
|---|---|---|
| Laki-laki | 14 | 63,64% |
| Wanita | 8 | 36,36% |
| ∑ Responden | 22 | 100 % |

Sumber: Data primer yang diolah, 2011

Bila digambarkan dalam diagram maka akan terlihat seperti di bawah ini :




**Diagram 4.1**
**Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**

Data yang diperoleh melalui kuesioner yang di isi oleh responden menunjukkan bahwa responden yang paling banyak adalah responden yang bejenis kelamin pria. Hal ini disebabkan karena dalam melaksanakan tugas pengawasan, pekerjaan sebagai auditor bersifat teknis. Sehingga lebih banyak pegawai pria daripada wanita.

## B. Profil Responden Berdasarkan Usia

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan usia dapat dilihat pada Tabel 4.2.

**Tabel 4.2**
**Profil Responden Berdasarkan Usia**

| Usia | ∑ Responden | Persentase (%) |
|---|---|---|
| 20-25 | 0 | 0 |
| 26-30 | 0 | 0 |
| 31-35 | 3 | 13, 64 % |
| 36-40 | 4 | 18,18 % |
| >40 | 15 | 68,18 % |
| ∑ Responden | 22 | 100 % |

Sumber: Data primer yang diolah, 2011

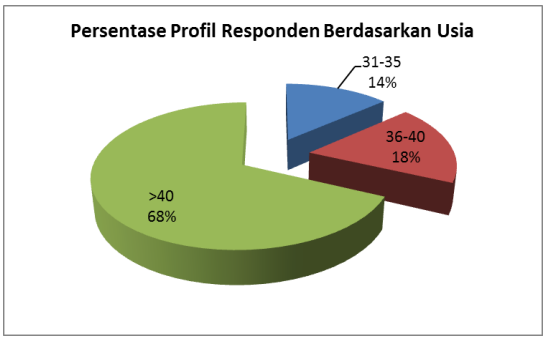



**Diagram 4.2**
**Profil Responden Berdasarkan Usia**

Berdasarkan Tabel 4.2 dapat diketahui auditor yang terdapat pada Inspektorat Kota Bandung berdasarkan usia. Data yang diperoleh melalui kuesioner yang diisi oleh responden menunjukkan bahwa beberapa responden berusia antara 30-35 dan berusia diatas 40 tahun . Usia ini dipercaya sebagai usia yang matang dalam dunia kerja. Kebanyakan usia ini menjabat sebagai auditor internal dan pejabat *structural*.

## C. Profil Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir dapat dilihat pada Tabel 4.3.

**Tabel 4.3**
**Profil Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir**

| Pendidikan Terakhir | ∑ Responden | Persentase (%) |
|---|---|---|
| SLTA | 0 | 0 |
| DIPLOMA | 3 | 13,64 % |
| S1 | 18 | 81,82 % |
| S2 | 1 | 4,55 % |
| S3 | 0 | 0 |
| ∑ Responden | 22 | 100 % |

Sumber: Data primer yang diolah, 2011

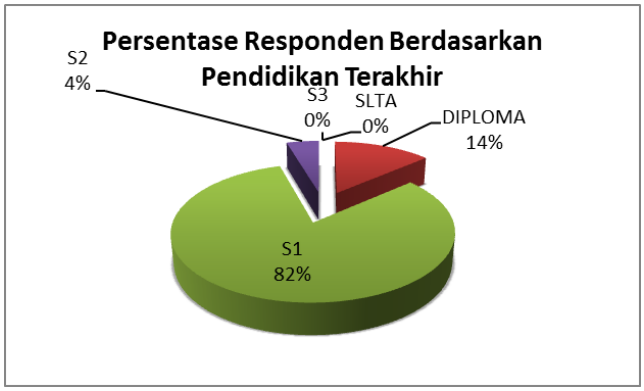



**Diagram 4.3**
**Profil Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir**

Data yang diperoleh melalui kuesioner yang di isi oleh responden menunjukkan bahwa responden yang paling banyak adalah responden yang berpendidikan terakhir S1. Dengan kualifikasi telah mengikuti pelatihan-pelatihan tentang profesi keauditoran.

## D. Profil Responden Berdasarkan Jabatan

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan jabatan dapat dilihat pada Tabel 4.4.

**Tabel 4.4**
**Profil Responden Berdasarkan Jabatan**

| Jabatan | ∑ Responden | Persentase (%) |
|---|---|---|
| Kep. Seksi. Kemasyarakatan I.W. III | 3 | 13,64 % |
| Auditor Ahli Madya | 1 | 4,55 % |
| Auditor Ahli Muda | 4 | 18,18 % |
| Auditor Penyelia | 2 | 9,09 % |
| Auditor Terampil | 1 | 4,55% |
| | | |
| ∑ Responden | 22 | 100 % |

Sumber: Data primer yang diolah, 2011

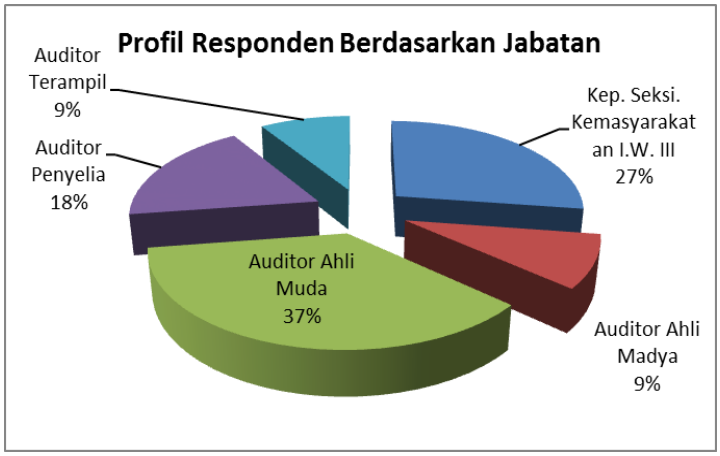



**Diagram 4.4**
**Profil Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir**

Data yang diperoleh melalui kuesioner yang diisi oleh responden menunjukkan bahwa responden yang paling banyak adalah responden yang menjabat sebagai pejabat struktural. Dimana pejabat *structural* adalah orang yang memegang kendali atas proses pengawasan yang ada termasuk dalam melakukan pendeteksian *fraud.*

## 4.3. Analisis Deskriptif

### 4.3.1 Analisis Deskriptif Pelaksanaan Pengendalian Intern Pada Pemerintahan Kota Bandung

Pengendalian intern mempunyai arti penting bagi kelangsungan usaha perusahaan, karena pengendalian intern merupakan tindakan untuk mengatur dan mengawasi kegiatan-kegiatan perusahaan sedemikian rupa, sehingga sesuai dengan apa yang diharapkan dengan adanya efektifitas dan efisiensi operasional perusahaan.

Pada bagian ini akan diuraikan data tanggapan 22 auditor sebagai responden atas pengendalian intern pada Pemerintahan Kota Bandung. Skor jawaban responden akan diklasifikasikan berdasarkan skor aktual dan skor ideal mengunakan rumus sebagai berikut:

$$\%\text{skor aktual} = \frac{\text{Skor aktual}}{\text{Skor ideal}} \times 100\%$$

Keterangan:

a. Skor aktual adalah skor jawaban yang diperoleh dari seluruh responden atas kuesioner yang telah diajukan
b. Skor ideal adalah skor maksimum atau skor tertingi yang mungkin diperoleh jika semua responden memilih jawaban dengan skor tertingi.

Analisis kualitatif diakukan mengacu kepada setiap indikator yang ada pada variabel sistem pengendalian intern. Untuk mendapatkan gambaran sistem pengendalian intern pada Pemerintahan Kota Bandung secara menyeluruh,

dilakukan rekapitulasi jumlah skor tanggapan responden atas kelima dimensi dan hasilnya dirangkum pada tabel berikut.

**Tabel 4.5**
**Rekapitulasi Skor Jawaban Responden Mengenai Pengendalian Intern**

| No | Dimensi | Skor Aktual | Skor Ideal | % | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lingkungan Pengendalian | 901 | 1100 | 81,91% | Baik |
| 2 | Penilaian Resiko | 150 | 220 | 68,18% | Baik |
| 3 | Aktivitas Pengendalian | 850 | 1210 | 70,25% | Baik |
| 4 | Informasi dan komunikasi dalam pengendalian intern | 160 | 220 | 72,73% | Baik |
| 5 | Pemantauan | 79 | 110 | 71,82% | Baik |
| **Total** | | **2140** | **2860** | **74,83%** | **Baik** |

Perhitungan:
Skor Ideal = Jumlah pertanyaan * Nilai tertinggi * Jumlah Responden

Berdasarkan persentase total skor tanggapan responden maka dapat disimpulkan bahwa Sistem Pengendalian Intern pada Pemerintahan Kota Bandung cukup baik. Berikut diuraikan hasil tanggapan responden mengenai Pengendalian Intern pada Pemerintah Kota Bandung berdasarkan dimensi:

**1. Lingkungan Pengendalian**

Dalam PP No. 60 Tahun 2008, Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya. Dimensi lingkungan pengendalian diukur menggunakan 8 indikator dan dioperasionalisasikan menjadi 10 butir pernyataan. Untuk mendapatkan gambaran lingkungan pengendalian secara menyeluruh, dilakukan rekapitulasi jumlah skor tanggapan responden atas kedelapan indikator dan hasilnya dirangkum pada tabel berikut:

**Table 4.6**
**Rekapitulasi Skor Jawaban Responden Pada Aspek Lingkungan Pengendalian**

| No | Indikator | Skor Aktual | Skor Ideal | % | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penegakan Integritas Nilai Etika | 265 | 330 | 80,30% | Baik |
| 2 | Komitmen terhadap kompetensi | 95 | 110 | 86,36% | Sangat Baik |
| 3 | Kepemimpinan yang Kondusif | 94 | 110 | 85,45% | Sangat Baik |
| 4 | Memiliki Struktur Organisasi | 91 | 110 | 82,73% | Baik |
| 5 | Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat | 93 | 110 | 84,55% | Sangat Baik |
| 6 | Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan SDM | 87 | 110 | 79,09% | Sangat Baik |
| 7 | Perwujudan peran aparat pengawasan intern yang efektif | 90 | 110 | 81,82% | Baik |
| 8 | Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait | 86 | 110 | 78,18% | Baik |
| | **Aspek Lingkungan Pengendalian** | **901** | **1100** | **81,91%** | **Baik** |

Sumber : Data yang diolah, 2011

Dari Tabel 4.6 diatas tampak bahwa Pemerintah Kota Bandung sudah dapat menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern. Hal ini belum menjawab fenomena yang penulis temukan yang menyatakan bahwa pengendalian intern masih kurang diterapkan, namun hal itu bisa disebabkan karena fenomena yang penulis ambil merupakan fenomena yang terjadi pada tahun 2007-2010. Dan dalam kurun waktu hingga 2011 ini Pemerintah Kota Bandung banyak melakukan pembenahan pada pengendalian internnya, sehingga responden menyatakan lingkungan pengendalian Pemerintah Kota Bandung dinyatakan baik.

## A. Penegakan integritas dan nilai etika

Dibawah ini jawaban responden mengenai penegakan integritas nilai etika adalah sebagai berikut:

**Table 4.7**
**Distribusi Jawaban Responden Mengenai Penegakan Integritas dan Nilai Etika**

| No | Butir Kuesioner | | Skor Jawaban Responden | | | | | Jumlah Skor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | Dalam lingkungan Pemkot Bandung suasana organisasi terpelihara budaya etika yang telah tercapai : | f | 0 | 0 | 4 | 15 | 3 | 87 |
| | | % | - | - | 13,79% | 68,97% | 17,24% | 100% |
| 2 | Dalam penyerahan LHKPN di Pejabat Eselon II di lingkungan Pemkot Bandung telah tercapai | f | 0 | 0 | 0 | 15 | 7 | 95 |
| | | % | - | - | - | 63,16% | 36,84% | 100% |
| **3** | Pelaporan LHKPN oleh Pejabat Eselon II kepada KPK telah sesuai jadwal : | f | 0 | 0 | 6 | 15 | 1 | 85 |
| | | | - | - | 21,69% | 72,29% | 6,02% | 100% |
| | **Total** | f | - | - | 10 | 45 | 11 | 265 |
| | | % | - | - | 11,32% | 67,92% | 20,75% | |
| **Persentase Total Skor Tanggapan Responden = 80,30%** | | | | | | | | |

Sumber : Data yang diolah, 2011

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada Tabel 4.7 diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal mengunakan rumus sebagai berikut :

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{265}{3x5x22} \text{ x } 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{265}{330} \text{ x } 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 80,30\%$$

Persentase total skor tanggapan responden sebesar 80,30% termasuk dalam kategori baik. . Hasil tanggapan responden pada pertanyaan no.1 sebesar 68,97% menyatakan bahwa dalam lingkungan Pemerintah Kota Bandung suasana organisasi sudah terperlihara budaya dan etika yang baik, sebesar 17,24 %

responden menyatakan sangat baik, sedangkan sebesar 13,79 % responden menganggap bahwa Pemerintah Kota Bandung cukup baik.

Hasil tanggapan responden pada pertanyaan no.2 sebesar 63,16% menyatakan bahwa 70% Pejabat eselon II telah menyerahkan LHKPN kepada KPK, dan sebesar 36,84 % responden menyatakan >70%. Dengan demikian dapat dilihat bahwa dengan kuesioner kedua lebih menekankan kembali bahwa Pemerintah Kota Bandung sudah baik dalam menegakkan integritas dan nilai etika.

Hasil tanggapan responden pada pertanyaan no.3 dominan responden menyatakan Pejabat Eselon II sudah menyerahkan LHKPN nya kepada KPK sesuai dengan jadwal sebesar 72,29%, responden yang menyatakan cukup sesuai jadwal sebesar 21,69% dan sangat sesuai jadwal sebesar 6,02%.

Dari hasil jawaban responden diatas memperlihatkan bahwa pertanyaan cukup sesuai dengan fenomena yang terjadi pada pencapaian target mempercepat pemberantas korupsi sesuai dengan Inpres No. 5 Tahun 2004, yaitu 70% dari 100 % capaian target Pejabat Eselon II telah menyerahkan LHKPN kepada KPK dan sudah sesuai dengan jadwal. Dengan kata lain Pemerintah Kota Bandung dapat dinilai baik dalam melaksanakan integritas dan nilai etika.

## B. Komitmen Terhadap Kompetensi

Kompetensi merupakan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas-tugas. Komitmen terhadap kompetensi meliputi pertimbangan manajemen terhadap tingkat kompetensi dari pekerjaan tertentu dan

bagaimana tingkatan tersebut berubah menjadi keterampilan dan pengetahuan yang diisyaratkan. Di bawah ini jawaban responden mengenai komitmen terhadap kompetensi, yaitu sebagai berikut:

**Tabel 4.8**
**Distribusi Jawaban Responden Mengenai Komitmen Terhadap Kompetensi**

| No | Butir Kuesioner | | Skor Jawaban Responden | | | | | Jumlah Skor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 4 | Kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pelaporan LHKPN di KPK sudah tercapai : | F | 0 | 0 | 0 | 15 | 7 | 95 |
| | | % | - | - | - | 63,16% | 36,84% | 100% |
| **Persentase Total Skor Tanggapan Responden = 86,36%** | | | | | | | | |

Sumber : Data yang diolah, 2011

Persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal mengunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{95}{1x5x22} \text{ x } 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{95}{110} \text{ x } 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 86,36\%$$

Dari tabel 4.8 di atas dapat diketahui bahwa persentase total skor tanggapan responden sebesar 86,36% yang dikategorikan sangat baik. Staff dan pegawai pada pemerintahan Kota Bandung sudah menyelesaikan tugas dan fungsinya dengan sangat baik, namun masih belum mencapai target 100 %. Terbukti dengan dengan skor tanggapan responden sebesar 63,16% yang menyatakan bahwa pelaporan LKHPN yang diserahkan kepada KPK sudah mencapai 70 %, dan skor responden sebesar 36,84% yang menyatakan > 70%.

Komitmen terhadap kompetensi paling kurang dilakukan dengan:

a. Mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi pada masing-masing posisi dalam SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah
b. Menyusun standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi pada masing-masing posisi dalam SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah
c. Menyelenggarakan pelatihan dan pembimbingan untuk membantu pegawai mempertahankan dan meningkatkan kompetensi pekerjaannya
d. Memilih pimpinan SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah yang memiliki kemampuan manajerial dan pengalaman teknis yang luas dalam pengelolaan SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah.

## C. Kepemimpinan yang kondusif

Dalam PP No. 60 Tahun 2008 Kepemimpinan yang kondusif sekurang-kurangnya ditunjukkan dengan:

1) mempertimbangkan risiko dalam pengambilan keputusan;
2) menerapkan manajemen berbasis kinerja;
3) mendukung fungsi tertentu dalam penerapan SPIP;
4) melindungi atas aset dan informasi dari akses dan penggunaan yang tidak sah;
5) melakukan interaksi secara intensif dengan pejabat pada tingkatan yang lebih rendah; dan
6) merespon secara positif terhadap pelaporan yang berkaitan dengan keuangan, penganggaran, program, dan kegiatan.

Di bawah ini jawaban responden mengenai kepemimpinan yang kondusif, yaitu sebagai berikut:

**Tabel 4.9**
**Distribusi Jawaban Responden Mengenai Kepemimpinan yang Kondusif**

| No | Butir Kuesioner | | Skor Jawaban Responden | | | | | Jumlah Skor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 5 | Dalam pengadaan barang & jasa pelaksanaan Diklat / Bintek telah tercapai : | f | 0 | 0 | 0 | 16 | 6 | 94 |
| | | % | - | - | - | 68,09% | 31,91% | 100% |
| **Persentase Total Skor Tanggapan Responden = 85,45%** | | | | | | | | |

Sumber : Data yang diolah, 2011

Persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal mengunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{94}{1x5x22} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{94}{110} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 85,45\%$$

Dari tabel 4.9 di atas dapat diketahui bahwa persentase total skor tanggapan responden mengenai kepemimpinan yang kondusif sebesar 85,45% yang termasuk kedalam kategori sangat baik. Dalam kenyataannya pencapaian Diklat/Bintek Pengadaan Barang & Jasa di Lingkungan Pemerintahan Kota Bandung baru mencapai 58,86% dari capaian target 100%. Hal itu terlihat pada lampiran pelaksanaan Kepres No. 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang & Jasa (Program tahun 2007-2010). Maka dari itu bisa dilihat adanya perkembangan yang lebih baik dalam kepemimpinan yang kondusif pada tahun 2011 ini. Terbukti dengan skor tanggapan responden 68,09 % menyatakan bahwa < 60 %

tercapainya Diklat / Bintek Pengadaan Barang & Jasa di lingkungan Pemerintahan Kota Bandung. Dan skor responden sebesar 31,91% yang menyatakan > 60%.

## D. Memiliki Struktur Organisasi

Struktur organisasi suatu satuan usaha membatasi garis tanggung jawab dan wewenang yang ada.. Struktur organisasi perlu dirancang sesuai dengan kebutuhan dengan pemberian tugas dan tanggung jawab kepada pegawai dengan tepat. Di bawah ini jawaban responden mengenai struktur organisasi, yaitu sebagai berikut:

**Tabel 4.10**
**Distribusi Jawaban Responden Mengenai Struktur Organisasi**

| No | Butir Kuesioner | | Skor Jawaban Responden | | | | | Jumlah Skor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 6 | kerangka kerja dalam mencapai tujuan organisasi terhadap penyempurnaan pelaksanaan Kepres No 80Tahun 2003 pada sistem *e-budgeting* tercapai : | **F** | 0 | 0 | 0 | 19 | 3 | 91 |
| | | **%** | - | - | - | 83,52% | 16,48% | 100% |
| **Persentase Total Skor Tanggapan Responden = 82,73%** | | | | | | | | |

Sumber : Data yang diolah, 2011

Persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal mengunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{91}{1x5x22} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{91}{110} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 82{,}73\%$$

Dari tabel 4.10 di atas dapat diketahui bahwa persentase total skor tanggapan responden mengenai kepemimpinan yang kondusif sebesar 82,73%

yang dapat dikategorikan baik. Terbukti dengan dengan skor tanggapan responden sebesar 83,52% menyatakan < 50%, dan sebesar 16,48% menyatakan > 50 %.

Dari tanggapan responden menyatakan Pemerintahan Kota Bandung sudah membentuk struktur organisasi untuk memberikan kejelasan wewenang dan tanggung jawab dengan baik pada penyempurnaan sistem *e-budgeting*, namun dalam fenomena yang terjadi menyatakan bahwa pencapaian penyempurnaan *e-budgeting* baru tercapai 50%. Hal ini bisa terjadi karena seiring dengan berjalannya waktu bahwa Pemerintahan Kota Bandung sudah sedikit demi sedikit memperbaiki kerangka kerja mereka untuk mencapai tujuan organisasi yang dalam hal ini bertujuan untuk meingkatkan kualitas pelayanan kepada publik.

## E. Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat

Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat sebagaimana dimaksud dalam PP No. 60 Tahun 2008 sekurang-kurangnya dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) wewenang diberikan kepada pegawai yang tepat sesuai dengan tingkat tanggung jawabnya dalam rangka pencapaian tujuan Instansi Pemerintah;
2) pegawai yang diberi wewenang sebagaimana dimaksud dalam huruf 1) memahami bahwa wewenang dan tanggung jawab yang diberikan terkait dengan pihak lain dalam Instansi Pemerintah yang bersangkutan; dan

3) pegawai yang diberi wewenang sebagaimana dimaksud dalam huruf 2) memahami bahwa pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab terkait dengan penerapan SPIP.

Di bawah ini jawaban responden mengenai pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat, yaitu sebagai berikut:

**Tabel 4.11**
**Distribusi Jawaban Responden Mengenai Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat**

| No | Butir Kuesioner | | Skor Jawaban Responden | | | | | Jumlah Skor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 7 | Wewenang & tanggung jawab pelaksanaan pemisahan tujuan & fungsi yang jelas pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai kategori | F | 0 | 0 | 0 | 17 | 5 | 93 |
| | | % | - | - | - | 73,12% | 26,88% | 100% |
| **Persentase Total Skor Tanggapan Responden = 84,55%** | | | | | | | | |

Sumber : Data yang diolah, 2011

Persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal mengunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{93}{1x5x22} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{93}{110} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 84,55\%$$

Dari tabel 4.11 di atas dapat diketahui bahwa persentase total skor tanggapan responden mengenai pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat sebesar 84,55% yang dapat dikategorikan sangat baik. Terbukti dengan dengan skor tanggapan responden sebesar 73,12% yang menyatakan bahwa < 20

% dari pejabat & karyawan/karyawati yang terdaftar atas pelaporan penandatanganan Piagam Pakta Integritas, dan 26,88% menjawab > 20 %.

Pemerintahan Kota Bandung sudah melaksanakan pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dengan baik yaitu dengan menandatangani Piagam Pakta Integritas, namun dalam fenomena yang ditemukan pada program percepatan pemberantasan korupsi tahun 2007-2010 capaian target masih < 20 % . Berarti dalam kurun waktu hingga tahun 2011 Pemerintah Kota Bandung sudah memperbaiki dan mengoptimalkan sedikit demi sedikit satuan usaha untuk membatasi garis dan tanggung jawab bagi staff dan karyawannya

## F. Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia

. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam PP No. 60 Tahun 2008 dilaksanakan dengan memperhatikan sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut:

1) penetapan kebijakan dan prosedur sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai;
2) penelusuran latar belakang calon pegawai dalam proses rekrutmen; dan
3) supervisi periodik yang memadai terhadap pegawai.

Di bawah ini jawaban responden mengenai penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan SDM, yaitu sebagai berikut:

**Tabel 4.12**
**Distribusi Jawaban Responden Mengenai Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia**

| No | Butir Kuesioner | | Skor Jawaban Responden | | | | | Jumlah Skor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 8 | Penetapan praktik-praktik dalam pembinaan SDM Pemkot Bandung untuk menunjang kegiatan Forum Komite Integritas / Pemantau Independen Tingkat Nasional tercapai : | **F** | 0 | 0 | 6 | 11 | 5 | 87 |
| | | **%** | - | - | 20,69% | 50,57% | 28,74% | 100% |
| **Persentase Total Skor Tanggapan Responden = 79,09%** | | | | | | | | |

Sumber : Data yang diolah, 2011

Persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal mengunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{87}{1x5x22} \text{ x } 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{87}{110} \text{ x } 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 79,09\%$$

Dari tabel 4.12 di atas dapat diketahui bahwa persentase total skor tanggapan responden mengenai penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan SDM sebesar 79,09% yang dapat dikategorikan baik. Terbukti dengan dengan skor tanggapan responden sebesar 50,57% baik, sebesar 28,74% menyatakan sangat baik , dan 20,69%cukup baik.

Jawaban responden di atas dapat menjelaskan fenomena yang terjadi bahwa 90 % dari capaian target 100% lingkungan Pemerintahan Kota Bandung terlibat pada kegiatan Forum Komite Integritas/ Pemantau Independen Tingkat Nasional.

## G. Perwujudan Peran Aparat Pengawasan Intern yang Efektif

Pengawasan internal yang ketat diharapkan mampu mengidentifikasikan dan meredam gejala *fraud*. Bentuk pengawasan internal yang ketat adalah dengan audit kinerja, audit investigatif dan audit laporan keuangan sesuai Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (PERMEN PAN No. PER/05/M.PAN/03/2008) dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Di bawah ini jawaban responden mengenai perwujudan peran aparat pengawasan intern yang efektif, yaitu sebagai berikut:

**Tabel 4.13**
**Distribusi Jawaban Responden Mengenai Perwujudan Peran Aparat Pengawasan Intern yang Efektif**

| No | Butir Kuesioner | | Skor Jawaban Responden | | | | | Jumlah Skor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 9 | Perwujudan peran aparat pengawasan intern dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi mencapai tingkat efektivitas : | F | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 90 |
| | | % | - | - | - | 88,89 | 11,11 | 100 |
| **Persentase Total Skor Tanggapan Responden = 81,82%** | | | | | | | | |

Sumber : Data yang diolah, 2011

Persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal mengunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{90}{1x5x22} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{90}{110} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 81{,}82\%$$

Dari tabel 4.13 di atas dapat diketahui bahwa persentase total skor tanggapan responden mengenai Perwujudan Peran Aparat Pengawasan Intern

yang Efektif sebesar 81,82% yang dikategorikan baik. Terbukti dengan dengan skor tanggapan responden sebesar 88,89 % menyatakan >87% capaian efektivitas perwujudan peran aparat pengawasan intern terhadap Pemerintah kota Bandung dalam melaksanakan Reformasi birokrasi, dan sebesar 11,11 % menyatakan <87%.

Hal ini dikarenakan pada fenomena yang terjadi pada program percepatan pemberantas korupsi sesuai Inpres No. 5 Tahun 2004 menyebutkan bahwa 87 % Pemerintahan Kota Bandung sudah melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan baik yang berarti perwujudan peran aparat pengawasan intern terhadapnya juga bisa dikatakan baik.

## H. Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait

Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah yang mengelola anggaran, akuntansi, dan perbendaharaan sehingga tercipta mekanisme saling uji. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan sebagai berikut:

a. Instansi pemerintah memiliki hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah yang mengelola anggaran, akuntansi dan perbendaharaan, serta melakukan pembahasan secara berkala tentang pelaporan keuangan dan anggaran, pengendalian intern serta kinerja
b. Pimpinan instansi pemerintah memiliki huubngan kerja yang baik dengan instansi pemerintah yang melaksanakan tanggung jawab pengendalian yang bersifat lintas instansi

Di bawah ini jawaban responden mengenai hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait, yaitu sebagai berikut:

**Tabel 4.14**
**Distribusi Jawaban Responden Mengenai Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait**

| No | Butir Kuesioner | | Skor Jawaban Responden | | | | | Jumlah Skor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 10 | Apakah mekanisme saling uji dalam pelaksanaan perijinan melalui pola pelayanan satu pintu antara instansi terkait sudah baik : | F | 0 | 0 | 5 | 14 | 3 | 86 |
| | | % | - | - | 17,44 | 65,12 | 17,44 | 100% |
| **Persentase Total Skor Tanggapan Responden = 78,18%** | | | | | | | | |

Sumber : Data yang diolah, 2011

Persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal mengunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{86}{1x5x22} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{86}{110} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 78,18\%$$

Dari tabel 4.14 di atas dapat diketahui bahwa Persentase total skor tanggapan responden mengenai hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait sebesar 78,18% yang bisa dikategorikan cukup baik. Terbukti dengan dengan skor tanggapan responden sebesar 65,12% menyatakan mekanisme saling uji dalam pelaksanaan perijinan melalui pola pelayanan satu pintu antara instansi terkait sudah baik, sebesar 17,44 % menyatakan sangat baik, dan sebesar 17,44% menyatakan cukup baik.

Dalam pelaksanaannya sebagai upaya peningkatan pelayanan publik dan meniadakan pungutan liar bisa dikatakan cukup baik dengan melihat bahwa terselenggaranya perijinan melalui pola pelayanan satu pintu (*one stop service*) dengan sistem *online* baru mencapai target sebesar 80 % dari capaian 100%. Sehingga mekanisme saling uji sebagai hubungan kerja antara instansi-instansi yang terkait di dalamnya bisa dikatakan cukup baik.

## 2. Penilaian Resiko

Dimensi penilaian resiko diukur menggunakan 2 indikator dalam 2 butir pernyataan. Untuk mendapatkan gambaran aspek penilaian resiko secara menyeluruh, dilakukan rekapitulasi jumlah skor tanggapan responden atas kedua dimensi dan hasilnya dirangkum pada tabel berikut:

**Tabel 4.15**
**Rekapitulasi Skor Jawaban Responden Pada Aspek Penilaian Resiko**

| No | Indikator | Skor Aktual | Skor Ideal | % | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Identifikasi resiko | 73 | 110 | 66,36 | Baik |
| 2 | Analisis resiko | 77 | 110 | 70,00 | Baik |
| | **Aspek Penilaian Resiko** | **150** | **220** | **68,18** | **Baik** |

Perhitungan:
Skor Ideal = Jumlah pertanyaan * Nilai tertinggi * Jumlah Responden

Berdasarkan persentase skor tanggapan responden sebesar 68,18% bahwa aspek penilaian resiko Pemerintahan Kota Bandung dapat dinyatakan baik Hal ini belum menjawab fenomena yang ditemukan penulis yang ada pada LHE Pemkot Bandung tahun 2009. Namun hal ini bisa terjadi karena ada pembenahan dari Pemkot Bandung untuk memperbaiki penetapan dan maksud tujuan mereka dan sudah mampu menilai resiko dengan baik, sehingga responden menyatakan penilaian resiko pada Pemkot Bandung dinyatakan baik.

## A. Identifikasi Resiko

Di bawah ini jawaban responden mengenai identifikasi resiko, yaitu sebagai berikut:

**Tabel 4.16**
**Distribusi Jawaban Responden Mengenai Identifikasi Resiko**

| No | Butir Kuesioner | | Skor Jawaban Responden | | | | | Jumlah Skor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 11 | Identifikasi secara efisien & efektif risiko pada indikator kinerja Pemkot terhadap capaiannya, memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik : | F | 1 | 2 | 8 | 11 | 0 | 73 |
| | | % | 1,37% | 5,48% | 32,88% | 60,27% | - | 100% |
| **Persentase Total Skor Tanggapan Responden = 66,36%** | | | | | | | | |

Sumber : Data yang diolah, 2011

Persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal mengunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{73}{1x5x22} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{73}{110} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 66{,}36\%$$

Dari tabel 4.16 di atas dapat diketahui bahwa Persentase total skor tanggapan responden mengenai penilaian resiko sebesar 66,36% yang bisa dikategorikan cukup baik. Terbukti dengan dengan skor tanggapan responden sebesar 60,27% menyatakan efisien & efektif risiko pada indikator kinerja Pemkot memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik, sebesar 32,88 % menyatakan cukup baik, sebesar 5,48% menyatakan kurang baik, dan 1, 37 % menyatakan tidak baik.

Hal diatas sesuai dengan fenomena yang penulis temukan pada Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Kota Bandung pada tahun 2009. Pasalnya, ternyata tujuan dan sasaran indikator kinerja Pemerintahan Kota Bandung belum memenuhi kriteria.

## A. Analisis Resiko

Di bawah ini jawaban responden mengenai analisis resiko, sebagai berikut:

**Tabel 4.17**
**Distribusi Jawaban Responden Mengenai Analisis Resiko**

| No | Butir Kuesioner | | Skor Jawaban Responden | | | | | Jumlah Skor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 12 | Apakah Pemkot Bandung sudah mampu menentukan dampak risiko yang telah teridentifikasi pada target kinerja sesuai ketetapan RPJMN : | F | 0 | 2 | 7 | 13 | 0 | 77 |
| | | % | - | 5,19% | 27,27% | 67,53% | - | 100% |
| **Persentase Total Skor Tanggapan Responden = 70,00%** | | | | | | | | |

Sumber : Data yang diolah, 2011

Persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal mengunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{77}{2x5x22} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{77}{110} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 70{,}00\%$$

Persentase total skor tanggapan responden mengenai analisis resiko sebesar 70,00% yang termasuk dalam kategori baik. Dari jawaban responden mayoritas menyatakan bahwa Pemerintahan Kota Bandung mampu menentukan dampak risiko yang telah teridentifikasi pada target kinerja sesuai ketetapan

RPJMN dengan skor responden sebesar 67,53%, diantaranya 27,27 % menyatakan cukup cukup, dan 5, 19 % menyatakan belum mampu.

Hal ini selaras dengan fenomena yang ditemukan pada LHE Kota Bandung 2009 yang menyatakan bahwa Target kinerja Pemerintah Kota Bandung belum sesuai dengan target yang ditetapkan dalam dokumen RPJMN. Sehingga Pemerintah Kota Bandung harus lebih meningkatkan kembali analisis risiko untuk pencapaian tujuan instansi.

### 3. Aktivitas Pengendalian

Dimensi etika diukur menggunakan 11 indikator dan dioperasionalisasikan menjadi 11 butir pernyataan. Untuk mendapatkan gambaran aktivitas pengendalian secara menyeluruh, akan dilakukan rekapitulasi jumlah skor tanggapan responden atas ketiga indikator dan hasilnya dirangkum pada tabel berikut.

**Tabel 4.18**
**Rekapitulasi Skor Jawaban Responden Pada Aspek Aktivitas Pengendalian**

| No | Indikator | Skor Aktual | Skor Ideal | % | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reviu atas kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan | 81 | 110 | 73,64% | Baik |
| 2 | Pembinan SDM | 80 | 110 | 72,73% | Baik |
| 3 | Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi | 73 | 110 | 66,36% | Cukup Baik |
| 4 | Pengendalian fisik atas asset | 83 | 110 | 75,45% | Baik |
| 5 | Penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja | 79 | 110 | 71,82% | Baik |
| 6 | Pemisahan fungsi | 79 | 110 | 71,82% | Baik |
| 7 | Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting | 74 | 110 | 67,27% | Cukup Baik |
| 8 | Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian | 75 | 110 | 68,18% | Baik |
| 9 | Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya | 72 | 110 | 65,45% | Cukup Baik |
| 10 | Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya | 78 | 110 | 70,91% | Baik |
| 11 | Dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian intern serta transaksi | 76 | 110 | 69,09% | Baik |

| No | Indikator | Skor Aktual | Skor Ideal | % | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|
| | dan kejadian penting | | | | |
| | **Aspek Aktivitas Pengendalian** | 850 | 1210 | 70,25% | **Baik** |

Perhitungan: Skor Ideal = Jumlah pertanyaan * Nilai tertinggi * Jumlah Responden

Secara keseluruhan aktivita pengendalian pada Pemerintah Kota Bandung pada umumnya baik. Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang dibangun oleh manajemen untuk mencapai tujuan laporan keuangan yang obyektif. Berikut tanggapan responden pada masing-masing butir pernyataan pada dimensi aktivitas pengendalian:

**A. Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah yang Bersangkutan**

Reviu atas kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan yaitu memantau pencapaian kinerja instansi pemerintah tersebut dibandingkan dengan rencana sebagi tolak ukur kinerja. Di bawah ini jawaban responden mengenai reviu atas kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan, yaitu sebagai berikut:

**Tabel 4.19**
**Distribusi Jawaban Responden Mengenai Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah yang Bersangkutan**

| No | Butir Kuesioner | | Skor Jawaban Responden | | | | | Jumlah Skor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 13 | Pada Pemkot Bandung pemantauan terhadap pencapaian RPJM belum direviu secara berkala : | **F** | 0 | 0 | 8 | 13 | 1 | 81 |
| | | **%** | - | - | 29,63 | 64,20 | 6,17 | 100 |
| **Persentase Total Skor Tanggapan Responden = 73,64%** | | | | | | | | |

Sumber : Data yang diolah, 2011

Persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal mengunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{81}{1x5x22} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{81}{110} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 73{,}64\%$$

Persentase total skor tanggapan responden mengenai Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah yang Bersangkutan sebesar 73,64% yang termasuk dalam kriteria baik. Dalam tanggapan responden dapat kita lihat bahwa 64,20 % menyatakan bahwa RPJM Pemerintahan Kota Bandung hanya beberapa yang direviu secara berkala, kemudian sebesar 29,63% menyatakan sudah direviu namun tidak berkala, dan 6,17% semua sudah direviu secara berkala.

Dalam fenomena yang didapatkan menyatakan RPJM belum direviu secara berkala yang terlihat pada LHE Pemerintahan Kota Bandung tahun 2009. Kurangnya pemantauan pencapaian kinerja pada instansi pemerintah yang kemudian dibandingkan dengan rencana kinerja sebagai tolak ukur kinerja. Namun pada tanggapan responden yang diolah tahun 2011 ini menyatakan baik karena Pemerintahan Kota Bandung sudah melakukan pembenahan untuk mereviu RPJM nya secara berkala.

## B. Pembinaan Sumber Daya Manusia

Instansi Pemerintah memiliki strategi pembinaan sumber daya manusia yang utuh dalam bentuk rencana strategis, rencana kerja tahunan, dan dokumen perencanaan sumber daya manusia lainnya yang meliputi kebijakan, program, dan praktek pengelolaan pegawai yang akan menjadi panduan bagi instansi

pemerintah. Di bawah ini jawaban responden mengenai pembinaan SDM, yaitu sebagai berikut:

**Tabel 4.20**
**Distribusi Jawaban Responden Mengenai Pembinaan SDM**

| No | Butir Kuesioner | | Skor Jawaban Responden | | | | | Jumlah Skor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 14 | Pembinaan SDM pada pembuatan dokumen RPJM belum baik karena RPJM belum digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan : | f | 0 | 0 | 8 | 14 | 0 | 80 |
| | | % | - | - | 30,00% | 70,00% | - | 100% |
| **Persentase Total Skor Tanggapan Responden = 72,73%** | | | | | | | | |

Sumber : Data yang diolah, 2011

Persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal mengunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{80}{1x5x22} \text{ x } 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{80}{110} \text{ x } 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 72{,}73\%$$

Dari tabel 4.20 di atas dapat diketahui persentase total skor tanggapan responden mengenai pembinaan SDM sebesar 72,73% yang termasuk dalam kategori baik. Pemkot Bandung cukup mampu memberikan pembinaan kepada Sumber Daya Manusia (SDM) nya. Namun, masih perlu ditingkatkan kembali. Karena pembuatan RPJM masih belum digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan. Sedangkan dalam pernyataan responden menyatakan 70,00% Sesuai acuan/ RPJM, dan 30,00% cukup sesuai acuan / RPJM.

Pembinaan Sumber Daya Manusia meliputi:

a. Pemahaman bersama atas visi, misi, tujuan, nilai, dan strategi Instansi Pemerintah.
b. Strategi pembinaan sumber daya manusia yang utuh
c. Strategi perencanaan sumber daya manusia yang spesifik dan eksplisit
d. Persyaratan jabatan dan menetapkan kinerja yang diharapkan
e. Pimpinan Instansi Pemerintah membangun kerja sama tim, mendorong penerapan visi Instansi, dan mendorong umpan balik pegawai

## C. Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi

Di bawah ini jawaban responden mengenai pengendalian atas pengelolaan sistem informasi, yaitu sebagai berikut:

**Tabel 4.21**
**Distribusi Jawaban Responden Mengenai Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi**

| No | Butir Kuesioner | | Skor Jawaban Responden | | | | | Jumlah Skor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 15 | Pembuatan RKT tahun 2009 belum memiliki keakuratan & kelengkapan informasi karena belum membuat sasaran rencana kinerja: | f | 0 | 4 | 7 | 11 | 0 | 73 |
| | | % | - | 10,96% | 28,77% | 60,27% | - | 100 % |
| Persentase Total Skor Tanggapan Responden = 66,36% | | | | | | | | |

Sumber : Data yang diolah, 2011

Persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal mengunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{73}{1x5x22} \text{ x } 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{73}{110} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 66{,}36\%$$

Dari tabel 4.21 di atas dapat diketahui Persentase total skor tanggapan responden mengenai pengendalian atas pengelolaan sistem informasi sebesar 66,36% yang termasuk dalam kategori cukup baik. Pemkot Bandung cukup mampu mengendalikan pengelolaan sistem informasinya, namun masih kurang karena pembuatan RKT pada tahun 2009 masih belum memuat sasaran rencana kinerja. Skor tanggapan responden sebesar 28,77% cukup akurat & lengkap, 60,27% belum akurat & lengkap. Dan 10,96% akurat & lengkap.

## D. Pengendalian Fisik atas Aset

Pimpinan instansi pemerintah menetapkan, mengimplementasikan, dan mengkomunikasikan rencana identifikasi, kebijakan, dan prosedur pengamanan fisik kepada seluruh pegawai. Di bawah ini jawaban responden mengenai pengendalian fisik atas aset, yaitu sebagai berikut:

**Tabel 4.22**
**Distribusi Jawaban Responden Mengenai Pengendalian Fisik atas Aset**

| No | Butir Kuesioner | | Skor Jawaban Responden | | | | | Jumlah Skor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 16 | Pengendalian fisik atas asset dalam pencatatannya pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | f | 0 | 2 | 2 | 17 | 1 | 83 |
| | | % | - | 4,82% | 7,23% | 81,93% | 6,02% | 100% |
| **Persentase Total Skor Tanggapan Responden = 75,45%** | | | | | | | | |

Sumber : Data yang diolah, 2011

Persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal mengunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{83}{1x5x22} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{83}{110} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 75{,}45\%$$

Persentase total skor tanggapan responden mengenai pengendalian fisik atas aset sebesar 75,45% termasuk ke dalam kategori baik. Dari tabel 4.22 di atas dapat diketahui Pemkot Bandung dapat mengamankan dan melindungi aset dengan baik dan sesuai dengan fenomena namun perlu ditingkatkan kembali. Terbukti dengan dengan skor tanggapan responden menyatakan baik sebesar 81,93%, skor responden yang menyatakan cukup baik 7,23% , sangat baik 6,02%, dan kurang baik 4,82%.

## E. Penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja

Ukuran dan indikator kinerja ditetapkan untuk tingkat instansi pemerintah, kegiatan dan pegawai instansi pemerintah mereviu dan melakukan validasi secara periodik atas ketetapan dan keandalan ukuran dan indikator kinerja. Di bawah ini jawaban responden mengenai penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja, yaitu sebagai berikut:

**Tabel 4.23**
**Distribusi Jawaban Responden Mengenai Penetapan dan Reviu atas Indikator dan ukuran kinerja**

| No | Butir Kuesioner | | Skor Jawaban Responden | | | | | Jumlah Skor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 17 | Reviu atas pengukuran kinerja dengan memonitoring pencapaian dokumen PK belum berkala : | f | 0 | 2 | 5 | 15 | 0 | 79 |
| | | % | - | 5,06% | 18,99% | 75,95% | - | 100% |
| **Persentase Total Skor Tanggapan Responden = 71,82%** | | | | | | | | |

Sumber : Data yang diolah, 2011

Persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal mengunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{79}{1x5x22} \text{ x } 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{79}{110} \text{ x } 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 71,82\%$$

Persentase total skor tanggapan responden mengenai penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja sebesar 71,82% yang dapat dikategorikan baik. Dari tabel 4.23 di atas dapat diketahui Pemkot Bandung sudah mampu menetapkan indikator kinerja untuk tingkat instansi pemerintah, serta cukup mampu mereviu dan melakukan validasi secara periodik atas keandalan ukuran indikator kinerja namun sesuai dengan kenyataannya Dokumen PK (Penetapan Kinerja) belum dimonitor pencapaiannya secara berkala yang terdapat dalam LHE Tahun 2009. Hal ini membuktikan bahwa Pemerintah Kota Bandung mulai lebih meningkatkan reviu atas indikator dan kinerjanya. Terbukti dengan dengan skor tanggapan responden menyatakan belum berkala 75,95%, sedangkan 18,99% menyatakan jarang dilakukan monitoring, dan 5,06% menyatakan sering dilakukan monitoring.

## C. Pemisahan Fungsi

Pimpinan instansi pemerintah harus menjamin bahwa seluruh aspek utama transaksi atau kejadian tidak dikendalikan oleh 1 (satu) orang. Di bawah ini jawaban responden mengenai pemisahan fungsi, yaitu sebagai berikut:

**Tabel 4.24**
**Distribusi Jawaban Responden Mengenai Pemisahan Fungsi**

| No | Butir Kuesioner | | Skor Jawaban Responden | | | | | Jumlah Skor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 18 | Pada Pemkot Bandung, tanggung jawab dan tugas atas transaksi dipisahkan dalam organisasi kegiatan pemanfaatannya belum diarahkan pada dokumen PK : | f | 0 | 0 | 9 | 13 | 0 | 79 |
| | | % | - | - | 34,18% | 65,82% | - | 100% |
| **Persentase Total Skor Tanggapan Responden = 71,82%** | | | | | | | | |

Sumber : Data yang diolah, 2011

Persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal mengunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{79}{1x5x22} \text{ x } 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{79}{110} \text{ x } 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 71,82\%$$

Dari tabel 4.24 di atas dapat diketahui persentase total skor tanggapan responden mengenai pemisahan fungsi sebesar 71,82% yang dapat dikategorikan baik. Pemkot Bandung dapat menjamin bahwa seluruh aspek utama transaksi atau kejadian tidak dikendalikan oleh 1 (satu) orang namun masih belum terarahkan sesuai dengan dokumen PK (Penetapan Kinerja). Terbukti dengan dengan skor tanggapan responden sebesar 65,82% menyatakan belum diarahkan, skor

responden sebesar 34,18% menyatakan cukup terarahkan. Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting

Pelaksanaan pemisahan fungsi meliputi:

1) Tidak seorangpun diperbolehkan mengendalikan seluruh aspek utama transaksi atau kejadian.
2) Tanggung jawab dan tugas atas transaksi atau kejadian dipisahkan di antara pegawai berbeda yang terkait dengan otorisasi, persetujuan, pemrosesan dan pencatatan, pembayaran atau pemerimaan dana, reviu dan audit, serta fungsi-fungsi penyimpanan dan penanganan aset.
3) Tugas dilimpahkan secara sistematik ke sejumlah orang untuk memberikan keyakinan adanya *checks and balances*.
4) Jika memungkinkan, tidak seorangpun diperbolehkan menangani sendiri uang tunai, surat berharga, dan aset berisiko tinggi lainnya.
5) Saldo bank direkonsiliasi oleh pegawai yang tidak memiliki tanggung jawab atas penerimaan, pengeluaran, dan penyimpanan kas.
6) Pimpinan Instansi Pemerintah mengurangi kesempatan terjadinya kolusi karena adanya kesadaran bahwa kolusi mengakibatkan ketidakefektifan pemisahan fungsi.

## G. Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting

Pimpinan instansi pemerintah menetapkan dan menkomunikasikan syarat dan ketentuan otorisasi kepada pegawai. Di bawah ini jawaban responden mengenai otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting, yaitu sebagai berikut:

**Tabel 4.25**
**Distribusi Jawaban Responden Mengenai Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting**

| No | Butir Kuesioner | | Skor Jawaban Responden | | | | | Jumlah Skor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 19 | Pada Pemkot Bandung, komunikasi pimpinan kepada pegawai dalam pengentrian terhadap laporan SKPD untuk mencapai keberhasilan sudah optimal : | f | 0 | 4 | 6 | 12 | 0 | 74 |
| | | % | - | 10,81% | 24,32% | 64,86% | - | 100% |
| **Persentase Total Skor Tanggapan Responden = 67,27%** | | | | | | | | |

Sumber : Data yang diolah, 2011

Persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal mengunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{74}{1x5x22} \text{ x } 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{73}{110} \text{ x } 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 67,27\%$$

Dari tabel 4.25 di atas dapat diketahui bahwa Pprsentase total skor tanggapan responden mengenai otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting sebesar 67,27% yang termasuk ke dalam kategori cukup baik. Pemkot Bandung sudah cukup optimal dalam menetapkan dan mengkomunikasikan syarat dan ketentuan otorisasi kepada pegawai khususnya dalam pengentrian SKPD. Namun dalam LHE Tahun 2009 disebutkan bahwa PK SKPD target kinerja yang diperjanjikan belum digunakan untuk mengukur keberhasilan. Sehingga perlu ditingkatkan kembali komunikasi kepada pegawai agar otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting bisa terdeteksi lebih baik Terbukti dengan dengan skor tanggapan responden sebesar 73,68% menyatakan Optimal, skor responden

sebesar 15, 79 % yang menyatakan cukup optimal dan 10,53% menyatakan kurang optimal. Otorisasi transaksi dan kejadian penting meliputi:

1) Memberikan keyakinan bahwa hanya transaksi dan kejadian yang valid diproses dan dientri, sesuai dengan keputusan dan arahan pimpinan Instansi Pemerintah Dokumentasi yang mencakup identifikasi, penerapan, dan evaluasi atas.
2) Adanya pengendalian untuk memastikan Bahwa hanya transaksi dan kejadian signifikan yang dientri adalah yang telah diotorisasi dan dilaksanakan hanya oleh pegawai sesuai lingkup otoritasnya.
3) Otorisasi yang secara spesifik

   Otorisasi yang ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan pimpinan Instansi Pemerintah

## H. Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian

Pimpinan instansi pemerintah menetapkan dan mengkomunikasikan syarat dan ketentuan otorisasi kepada pegawai. Di bawah ini jawaban responden mengenai pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian, yaitu sebagai berikut:

**Tabel 4.26**
**Distribusi Jawaban Responden Mengenai Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian**

| No | Butir Kuesioner | | Skor Jawaban Responden | | | | | Jumlah Skor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 20 | Apakah keakuratan pada pencatatan dokumen RKT belum selaras dengan RPJMD / Renstra atasannya | f | 0 | 0 | 9 | 13 | 0 | 75 |
| | | % | - | - | 52,00% | 48,00% | - | 100% |
| **Persentase Total Skor Tanggapan Responden = 68,18%** | | | | | | | | |

Sumber : Data yang diolah, 2011

Persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal mengunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{75}{1x5x22} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{75}{110} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 68{,}18\%$$

Dari tabel 4.26 di atas dapat diketahui Persentase total skor tanggapan responden mengenai pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian sebesar 68,18% yang termasuk kedalam kategori baik. Responden menyatakan Pemkot Bandung cukup mampu melaksanakan pencatatan yang akurat dan cukup tepat waktu pada transaksi atas kejadian. Namun dalam kenyataannya dalam Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tidak selaras dengan dokumen RPJMD / Renstra atasannya. Yang artinya pimpinan instansi wajib meningkatkan keakuratan dan ketepatwaktuan atas kejadian transaksi dan kejadian. Terbukti dengan dengan skor tanggapan responden sebesar 52 % menyatakan cukup selaras, skor responden sebesar 48% menyatakan belum selaras. Dan sifat dari pertanyaan ini adalah negatif.

## I. Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya

Menetapkan akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatanya, pemerintah wajib memberikan aksen hanya kepada yang berwenang dan mealakukan reviu atas pemabtasan tersebut secara berkala. Di bawah ini jawaban responden mengenai pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya, yaitu sebagai berikut:

**Tabel 4.27**
**Distribusi Jawaban Responden Mengenai Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya**

| No | Butir Kuesioner | | Skor Jawaban Responden | | | | | Jumlah Skor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 21 | Apakah pemberian akses kepada pegawai yang berwenang dilaksa-nakan dengan baik oleh pegawai dalam mendukung sasaran RKPD /RKT berorientasi hasil : | f | 0 | 0 | 16 | 6 | 0 | 72 |
| | | % | - | - | 66,67% | 33,33% | - | 100% |
| **Persentase Total Skor Tanggapan Responden = 65,45%** | | | | | | | | |

Sumber : Data yang diolah, 2011

Persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal mengunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{72}{1x5x22} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{72}{110} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 65,45\%$$

Dari tabel 4.27 di atas dapat diketahui persentase total skor tanggapan responden mengenai pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya sebesar 65,45% yang termasuk ke dalam kategori cukup baik. Pada dasarnya Pemkot Bandung cukup mampu menetapkan akuntabilitas terhadap sumber daya

dan pencatatannya, namun dalam LHE Tahun 2009 dinyatakan bahwa sasaran RKPD masih belum berorientasi hasil sehingga perlu ditingkatkan atau dibenahi kembali. Hal ini terbukti dengan dengan skor tanggapan responden sebesar 66,67% menyatakan cukup berorientasi hasil dan skor responden sebesar 33,33% menyatakan belum berorientasi hasil dengan sifat pertanyaan negatif.

Pembatasan akses atas sumber daya dilakukan agar:

1) Risiko penggunaan secara tidak sah atau kehilangan dikendalikan dengan membatasi akses ke sumber daya dan pencatatannya hanya kepada pegawai yang berwenang.
2) Penetapan pembatasan akses untuk penyimpanan secara periodik direviu dan dipelihara.
3) Pimpinan Instansi Pemerintah mempertimbangkan faktor-faktor seperti nilai aset, kemudahan dipindahkan tingkat akses.

## J. Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya

Pimpinan instansi pemerintah wajib menugaskan pegawai yang bertanggung jawab terhadap penyimpanan sumber daya dan pencatatanya serta melakukan reviu atas penugasan tersebut secara berkal. Di bawah ini jawaban responden mengenai akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya, yaitu sebagai berikut:

**Tabel 4.28**
**Distribusi Jawaban Responden Mengenai Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya**

| No | Butir Kuesioner | | Skor Jawaban Responden | | | | | Jumlah Skor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 22 | Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya dilakukan dalam jangka waktu | f | 0 | 0 | 10 | 12 | 0 | 78 |
| | | % | - | - | 38,46% | 61,54% | - | 100% |
| **Persentase Total Skor Tanggapan Responden = 70,91%** | | | | | | | | |

Sumber : Data yang diolah, 2011

Persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal mengunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{78}{1x5x22} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{78}{110} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 70,91\%$$

Persentase total skor tanggapan responden mengenai akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya sebesar 70,91% yang termasuk dalam kategori baik. Dari tabel 4.28 di atas dapat diketahui Pemkot Bandung cukup mampu menugaskan pegawai yang bertanggung jawab terhadap penyimpanan sumber daya dan cukup direviu dengan baik, namun belum cukup mampu menunjang kegiatan RKPD agar memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik . Hal ini terlihat dari LHE Pemerintahan Kota Bandung Tahun 2009. Yang berarti perlu ada peningkatan dan pembenahan dalam penugasan pegawai yang bertanggung jawab dan melakukan reviu penugasan tersebutsecara berkala. Terbukti dengan dengan skor tanggapan responden sebesar 61,54% menyatakan kurang sesuai

kriteria, dan sisanya sebesar 38,46% menyatakan cukup sesuai kriteria yaitu memenuhi indikator kinerja yang baik. Dengan sifat pernyataan negatif.

## K. Dokumentasi yang Baik atas Sistem Pengendalian Intern serta Transaksi dan Kejadian Penting

Instansi pemerintah wajib memiliki, mengelola, memelihara, dan secara berkala memutakhiran dokumentasi yang mencangkup seluruh system mengendalian intern serta tranksaksi dan kejadian penting. Di bawah ini jawaban responden mengenai dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian intern serta transaksi dan kejadian penting, yaitu sebagai berikut:

**Tabel 4.29**
**Distribusi Jawaban Responden Mengenai Dokumentasi yang Baik atas Sistem Pengendalian Intern serta Transaksi dan Kejadian Penting**

| No | Butir Kuesioner | | Skor Jawaban Responden | | | | | Jumlah Skor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 23 | Dokumentasi dalam pencapaian sasaran indikator di Pemkot Bandung belum baik : | f | 0 | 2 | 8 | 12 | 0 | 76 |
| | | % | - | 5,26% | 31,58% | 63,16% | - | 100% |
| **Persentase Total Skor Tanggapan Responden = 69,09%** | | | | | | | | |

Sumber : Data yang diolah, 2011

Persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal mengunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{76}{1x5x22} \text{ x } 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{76}{110} \text{ x } 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 69,09\%$$

Persentase total skor tanggapan responden mengenai dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian intern serta transaksi dan kejadian penting sebesar 69,09% yang termasuk ke dalam kategori baik. Pemerintah Kota Bandung secara keseluruhan memiliki, mengelola, memelihara, dan secara berkala memutakhirkan dokumentasi yang mencakup seluruh "Sistem Pengendalian Intern " serta transaksi dan kejadian penting dengan baik. Hal ini terlihat dari skor responden sebesar 63,16% menyatakan bahwa 23. Dokumentasi dalam pencapaian sasaran indikator di Pemkot Bandung kurang sesuai indikator kinerja, sebesar 31,58% menyatakan cukup sesuai indikator kinerja dan 5,26% menyatakan esuai indikator kinerja. Namun hal ini belum tampak pada LHE Pemerintah Kota Bandung yang menyatakn bahwa Kegiatan RKPD belum merupakan cara untuk mencapai sasaran indikator kinerja sehingga perlu ditingkatkan dan dibenahi kembali.

**4. Informasi dan Komunikasi dalam Pengendalian Intern**

Informasi adalah data yang telah diolah yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dengan menggunakan simbol atau lambang tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan balik. Dimensi informasi dan komunkasi diukur menggunakan 1 indikator dan dioperasionalisasikan menjadi 2 butir pernyataan. Untuk mendapatkan gambaran informasi dan komunikasi secara

menyeluruh, akan dilakukan rekapitulasi jumlah skor tanggapan responden atas indikator dan hasilnya dirangkum pada tabel berikut.

**Tabel 4.30**
**Rekapitulasi Skor Jawaban Responden Pada Aspek Informasi dan Komunikasi dalam Pengendalian Intern**

| No | Indikator | Skor Aktual | Skor Ideal | % | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi serta mengelola, mengembangkan dan memperbarui sistem informasi secara terus-menerus | 160 | 220 | 72,73% | Baik |
| | **Aspek Informasi dan Komunikasi dalam Pengendalian Intern** | 160 | 220 | 72,73% | **Baik** |

Perhitungan: Skor Ideal = Jumlah pertanyaan * Nilai tertinggi * Jumlah Responden

Secara keseluruhan aspek informasi dan komunikasi pada Pemerintah Kota Bandung pada umumnya sudah baik. Instansi pemerintah harus memiliki informasi yang relevan dan dapat diandalkan baik informasi keuangan maupun non keuangan, yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa eksternal dan internal, yang menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi serta mengelola, mengembangkan dan memperbarui sistem informasi secara terus-menerus. Berikut tanggapan responden pada butir pernyataan pada dimensi informasi dan komunikasi:

**A. Menyediakan dan Memanfaatkan Berbagai Bentuk dan Sarana Komunikasi serta Mengelola, Mengembangkan dan Memperbarui Sistem Informasi secara Terus-menerus**

Di bawah ini jawaban responden mengenai menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi serta mengelola,

mengembangkan dan memperbarui sistem informasi secara terus-menerus, yaitu sebagai berikut:

**Tabel 4.31**
**Distribusi Jawaban Responden Mengenai Menyediakan dan Memanfaatkan berbagai Bentuk dan Sarana Komunikasi serta Mengelola, Mengembangkan dan Memperbarui Sistem Informasi secara Terus-menerus**

| No | Butir Kuesioner | | Skor Jawaban Responden | | | | | Jumlah Skor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 24 | Sarana informasi mencukupi dan dapat diandalkan belum baik dalam menunjang penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU): | f | 0 | 2 | 8 | 12 | 0 | 87 |
| | | % | - | 5,26% | 31,58% | 63,16% | - | 100% |
| 25 | Infromasi yang update dan relevan belum baik dalam penerapan penetapan Indikator Kinerja Utama : | f | 0 | 0 | 8 | 11 | 1 | 73 |
| | | % | - | - | 32,88% | 60,27% | 6,85% | 100% |
| | **Total** | f | - | - | 16 | 23 | 1 | 160 |
| | | % | - | - | 30,00% | 57,50% | 3,13% | |
| **Persentase Total Skor Tanggapan Responden = 72,73%** | | | | | | | | |

Sumber : Data yang diolah, 2011

Persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal mengunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{87}{2x5x22} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{160}{220} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 72,73\%$$

Persentase total skor tanggapan responden mengenai menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi serta mengelola, mengembangkan dan memperbarui sistem informasi secara terus-menerus sebesar 72,73% yang termasuk ke dalam kategori baik. Responden yang menyatakan

sarana informasi mencukupi dan dapat diandalkan dalam menunjang penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) belum sesuai sebesar 63,16%, sebesar 31,58% menyatakan cukup sesuai IKU, dan 5,26% menyatakan sesuai dengan IKU.

Dari tanggapan responden dapat terlihat bahwa secara keseluruhan Pemerintah sudah cukup baik dalam memiliki informasi yang relevan dan dapat diandalkan baik informasi keuangan maupun nonkeuangan, yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa eksternal serta internal. Namun dalam LHE Pemerintahan Kota Bandung dinyatakan bahwa perlu dibenahi dan ditingkatkan kembali karena belum menunjang dalam pembuatan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU).

**5. Pemantauan**

Kegiatan pengelolaan rutin *supervise*, pembandingan rekonsiliasi dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas, dimana evaluasi terpisah dapat dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah atau pihak eksternal pemerintah serta menggunakan daftar uji intern. Dimensi pemantauan diukur menggunakan 1 indikator dan dioperasionalisasikan menjadi 1 butir pernyataan. Untuk mendapatkan gambaran pemantauan secara menyeluruh, akan dilakukan rekapitulasi jumlah skor tanggapan responden atas indikator dan hasilnya dirangkum pada tabel berikut :

**Tabel 4.32**
**Rekapitulasi Skor Jawaban Responden Pada Aspek Pemantauan**

| No | Indikator | Skor Aktual | Skor Ideal | % | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Evaluasi terpisah dapat dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah atau pihak eksternal pemerintah serta menggunakan daftar uji intern | 79 | 110 | 71,82% | Baik |
| | **Aspek Pemantauan** | 79 | 110 | 71,82% | **Baik** |

Perhitungan: Skor Ideal = Jumlah pertanyaan * Nilai tertinggi * Jumlah Responden

Secara keseluruhan pemantauan pada Pemerintah Kota Bandung sudah berjalan dengan baik. Pemantauan yang dilakukan meliputi proses penilaian atas mutu kinerja Sistem Pengendalian Intern dan proses yang memberikan keyakinan bahwa temuan audit dan evaluasi lainnya segera ditindaklanjuti oleh Pemkot Bandung. Berikut tanggapan responden pada butir pernyataan pada dimensi pemantauan:

## A. Evaluasi Terpisah dapat dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah atau Pihak Eksternal Pemerintah serta Menggunakan Daftar Uji Intern

Di bawah ini jawaban responden mengenai evaluasi terpisah dapat dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah atau pihak eksternal pemerintah serta menggunakan daftar uji intern, yaitu sebagai berikut:

**Tabel 4.33**
**Distribusi Jawaban Responden Mengenai Evaluasi Terpisah dapat dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah atau Pihak Eksternal Pemerintah serta Menggunakan Daftar Uji Intern**

| No | Butir Kuesioner | | Skor Jawaban Responden | | | | | Jumlah Skor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 26 | Pihak eksternal dalam melakukan pengawasan pada satuan pengawas intern dilakukan secara | f | 0 | 0 | 9 | 13 | 0 | 79 |
| | | % | - | - | 34,18% | 65,82% | 0 | 100% |
| **Persentase Total Skor Tanggapan Responden = 71,82%** | | | | | | | | |

Sumber : Data yang diolah, 2011

Persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal mengunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{79}{1x5x22} \text{ x } 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{79}{110} \text{ x } 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 71,82\%$$

Persentase total skor tanggapan responden mengenai evaluasi terpisah dapat dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah atau pihak eksternal pemerintah serta menggunakan daftar uji intern sebesar 71,82% yang termasuk kedalam kategori baik. Mayoritas responden yaitu 65,82% menyatakan bahwa Evaluasi dalam melakukan supervisi terhadap pengumpulan data kinerja belum dilakukan sehingga sesuai dengan LHE Pmerintahan Kota Bandung menyatakan bahwa dalam SKPD Kota Bandung Tidak terdapat pengumpulan data kinerja. Dan sisanya 34,18% menjawab jarang dilakukan.

### 4.3.2 Analisis Deskriptif Pelaksanaan Pencegahan Fraud Pada Pemerintahan Kota Bandung

Pada bagian ini akan diuraikan data tanggapan mengenai penerapan Pelaksanaan Pencegahan *Fraud* Pada Pemerintahan Kota Bandung. Sama halnya dengan Sistem Pengendalian Intern jawaban responden akan diklasifikasikan berdasarkan skor aktual dan skor ideal.

Analisis deskriptif dilakukan mengacu kepada setiap indikator yang ada pada variabel pencegahan f*raud*. Untuk mendapatkan gambaran tingkat penerapan pelaksanaan pencegahan *fraud* pada Pemerintahan Kota Bandung secara menyeluruh, dilakukan rekapitulasi jumlah skor tanggapan responden atas ketiga dimensi dan hasilnya dirangkum pada tabel berikut.

**Tabel 4.34**
**Rekapitulasi Skor Jawaban Responden Mengenai Pelaksanaan Pencegahan *Fraud***

| No | Dimensi | Skor Aktual | Skor Ideal | % | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Menciptakan dan mengembalikan budaya yang menghargai kejujuran dan nilai-nilai etika yang tinggi. | 290 | 440 | 65,91% | Cukup Baik |
| 2 | Penerapan dan evaluasi proses pengendalian anti-*fraud* | 213 | 330 | 64,55% | Cukup Baik |
| 3 | Pengembangan Proses Pengawasan (Oversight procecess) | 73 | 110 | 66,36% | Cukup Baik |
| | **Total** | 576 | 880 | 65,45% | **Cukup Baik** |

Perhitungan: Skor Ideal = Jumlah pertanyaan * Nilai tertinggi * Jumlah Responden

Berdasarkan persentase total skor tanggapan responden sebesar 65,45% maka dapat disimpulkan bahwa penerapan pelaksanaan pencegahan *fraud* di Pemerintah Kota Bandung berjalan cukup baik. Hal ini menjawab fenomena yang penulis temukan yang telihat pada pencapaian Program Inpres No.5 Tahun 2004

yaitu kurangnya kesadaran dalam lingkungan Pemkot dalam pelaksanaan kejujuran dan etika yg akan mendukung dalam pencegahan *fraud*, penerapan dan evaluasi proses pengendalian anti-fraud yang masih belum optimal, dan proses pengawasan belum maksimal. Berikut diuraikan hasil tanggapan responden mengenai penerapan prinsip pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kota Bandung berdasarkan dimensi.

**1. Tanggapan Responden Terhadap Menciptakan dan Mengembalikan Budaya yang Menghargai Kejujuran.**

Salah satu tanggung jawab organisasi adalah menumbuhkan budaya yang menghargai kejujuran dan nilai-nilai etika yang tinggi dan menjelaskan perilaku yang diharapakan dan kesadaran dari masing-masing pegawai, menciptakan budaya yang menghargai kejujuran dan nilai-nilai etika tinggi hendaknya mencangkup hal-hal sebagai berikut: *Setting the at the top*, Merekrut dan mempromosikan karyawan yang tepat, Pelatihan, Disiplin.

Untuk mendapatkan gambaran menciptakan dan mengembalikan budaya yang menghargai kejujuran. di Pemerintah Kota Bandung secara menyeluruh, dilakukan rekapitulasi jumlah skor tanggapan responden atas keempat dimensi dan hasilnya dirangkum pada tabel berikut.

**Tabel 4.35**
**Rekapitulasi Skor Jawaban Responden Pada Aspek Menciptakan dan Mengembalikan Budaya yang Menghargai Kejujuran.**

| No | Dimensi | Skor Aktual | Skor Ideal | % | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *Setting the at the top* | 69 | 110 | 62,73% | Cukup Baik |
| 2 | Merekrut dan mempromosikan karyawan yang tepat | 74 | 110 | 67,27% | Cukup Baik |

| No | Dimensi | Skor Aktual | Skor Ideal | % | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Pelatihan | 73 | 110 | 66,36% | Cukup Baik |
| 5 | Disiplin | 74 | 110 | 67,27% | Cukup Baik |
| | **Total** | **290** | **440** | **65,91%** | **Cukup Baik** |

Perhitungan: Skor Ideal = Jumlah pertanyaan * Nilai tertinggi * Jumlah Responden

Secara keseluruhan menciptakan dan mengembalikan budaya yang menghargai kejujuran pada Pemerintah Kota Bandung termasuk dalam kategori cukup baik berdasarkan empat butir indikator. Hal ini terjadi karena masih kurangnya sosialisasi *setting at the top* yaitu dalam penelaahan peraturan undang-undang, kurang ketatnya penyeleksian atau perekrutan karyawan baru, pelatihan belum dilakukan secara berkala, dan masih kurangnya tingkat kedisiplinan dalam tubuh Pemerintah Kota Bandung. Berikut tanggapan responden pada masing-masing butir pernyataan pada empat indikator tersebut.

## A. *Setting at te top*

*Setting at the top* ditujukan sebagai penelaahan peraturan perundang-undangan, tujuanya untuk memperoleh pengertian mengenai peraturan-peraturan yang bersifat umum yang ditetapkan pada semua instansi atau organisasi.

**Tabel 4.36**
**Distribusi Jawaban Responden Mengenai *Setting the at the top***

| No | Butir Kuesioner | | Skor Jawaban Responden | | | | | Jumlah Skor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 27 | Penelaahan Pemkot terhadap Undang-undang No. 28 tahun 1999 yang memahami tata cara pengisian formulir LHKPN mencapai target : | **f** | 0 | 0 | 8 | 10 | 1 | 69 |
| | | **%** | - | - | 34,78% | 57,97% | 7,25% | 100% |
| **Persentase Total Skor Tanggapan Responden = 62,73%** | | | | | | | | |

Sumber : Data yang diolah, 2011

Persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal mengunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{80}{1x5x22} \text{ x } 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{80}{110} \text{ x } 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 62{,}73\%$$

Persentase total skor tanggapan responden mengenai kerugian daerah sebesar 62,73% yang termasuk kedalam kategori cukup baik. Dari tabel 4.36 di atas dapat diketahui Pemkot Bandung belum cukup mengerti mengenai peraturan-peraturan yang bersifat umum yang ditetapkan pada instansi dengan memahami tata cara pengisian formulir LHKPN. Terbukti dengan dengan skor tanggapan mayoritas responden sebesar 57,97% menyatakan 90% seluruh Pejabat Eselon II di Lingkungan Pemkot Bandung memahami tata cara pengisian formulir LHKPN , sebesar 34,78% menyatakan < 90% dan sisanya 7,25% menyatakan < 70%. Hal ini belum sesuai dengan capaian target Upaya penerapan Undang-undang no. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

**B. Merekrut dan mempromosikan karyawan yang tepat.**

Untuk mencegah *fraud* Pemerintah Kota Bandung harus mengadakan Diadakan penyeleksian pada setiap perekrutan staff dan ditempatkan sesuai dengan bidang keahlianya terlebih dahulu.

Di bawah ini jawaban responden mengenai merekrut dan mempromosikan karyawan yang tepat., yaitu sebagai berikut:

**Tabel 4.37**
**Distribusi Jawaban Responden Mengenai Merekrut dan mempromosikan karyawan yang tepat.**

| No | Butir Kuesioner | | Skor Jawaban Responden | | | | | Jumlah Skor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 28 | Penyeleksian & perekrutan staff dan karyawan dalam meningkatkan kualitas kepada publik mencapai :: | f | 0 | 3 | 8 | 11 | 0 | 74 |
| | | % | - | 8,11% | 32,43% | 59,46% | 0 | 100% |
| **Persentase Total Skor Tanggapan Responden = 67,27%** | | | | | | | | |

Sumber : Data yang diolah, 2011

Persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal mengunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{74}{1x5x22} \text{ x } 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{78}{110} \text{ x } 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 67,27\%$$

Persentase total skor tanggapan responden mengenai kerugian daerah sebesar 67,27% yang termasuk kedalam kategori cukup baik. Dari tabel 4.37 di atas dapat diketahui Pemkot Bandung cukup baik dalam mengadakan penyeleksian pada setiap perekrutan staff dan ditempatkan sesuai dengan bidang keahlianya. Dan dalam kenyataannya capaian target sertifikasi ISO 9000 : 2000 baru mencapai 50% yang tertera dalam program percepatan pemberantasan korupsi ahun 2007-2010. Yang berarti Pemerintah Kota Bandung harus berusaha untuk membenahi dan menjadi lebih baik. Terbukti dengan dengan skor tanggapan responden sebesar 59,46% menyatakan penyeleksian & perekrutan

staff dan karyawan dalam meningkatkan kualitas kepada publik mencapai < 50%, sebesar 32,43% menjawab 30 %, dan sisanya sebesar 8,11% menjawab < 30 %.

## C. Pelatihan

Setiap anggota pada sub-sub organisasi seharusnya mengikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh pemerintah kota bandung untuk meningkatkan profesionalisme dan kualitas kerja karyawan maupun entitas itu sendiri.

Di bawah ini jawaban responden mengenai pelatihan., yaitu sebagai berikut:

**Tabel 4.38**
**Distribusi Jawaban Responden Mengenai Pelatihan**

| No | Butir Kuesioner | | Skor Jawaban Responden | | | | | Jumlah Skor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 29 | Apakah pelatihan berkala belum dilakukan untuk meningkatkan profesionalisme & kualitas kerja di setiap SKPD pada Pemkot Bandung :: | f | 0 | 2 | 11 | 9 | 0 | 73 |
| | | % | - | 5,48% | 45,21% | 49,32% | - | 100% |
| **Persentase Total Skor Tanggapan Responden = 66,36%** | | | | | | | | |

Sumber : Data yang diolah, 2011

Persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal mengunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{73}{1x5x22} \text{ x}100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{73}{110} \text{ x}100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 66,36\%$$

Persentase total skor tanggapan responden mengenai kerugian daerah sebesar 66,36% yang termasuk kedalam kategori cuku baik. Dari tabel 4.38 di atas

dapat diketahui setiap anggota instansi dan pegawai Pemerintah Kota Bandung belum mengikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh Pemerintah Kota Bandung untuk meningkatkan profesionalisme kerja, dalam kenyataannya menyebutkan bahwa capaian target ISO masih 50% dari capaian target 100%. Hal ini membuktikan bahwa Pemerintah Kota Bandung harus lebih mengoptimalisasi target yang akan dicapai. Semakin target tercapai, tujuan pemerintah dan pencegahan *fraud* di dalam nya dapat berjalan dengan baik. Terbukti dengan dengan skor tanggapan responden menyatakan sebesar 49,32% pelatihan dilakukan tidak secara berkala dalam meningkatkan profesionalisme & kualitas kerja di setiap SKPD pada Pemkot Bandung, 45,21% menyatakan jarang dilakukan, dan sisanya 5,48% menyatakan hanya diwaktu-waktu tertentu.

## D. Disiplin

Staff baik karyawan maupun atasan harus mentaati peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh instansi Pemeritah Kota Bandung. Di bawah ini jawaban responden mengenai disiplin., yaitu sebagai berikut:

**Tabel 4.39**
**Distribusi Jawaban Responden Mengenai Disiplin**

| No | Butir Kuesioner | | Skor Jawaban Responden | | | | | Jumlah Skor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 30 | Apakah Pejabat Eselon II di lingkungan Pemkot Bandung sudah mentaati aturan-aturan dan ketetapan yang dibuat oleh pemerintah | f | 0 | 2 | 12 | 7 | 1 | 74 |
| | | % | - | 8,11% | 32,43% | 59,46% | - | 100% |
| **Persentase Total Skor Tanggapan Responden = 66,36%** | | | | | | | | |

Sumber : Data yang diolah, 2011

Persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal mengunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{\% skor tanggapan responden} = \frac{74}{1x5x22} \text{ x } 100\%$$

$$\text{\% skor tanggapan responden} = \frac{74}{110} \text{ x } 100\%$$

$$\text{\% skor tanggapan responden} = 67{,}27\%$$

Persentase total skor tanggapan responden mengenai kerugian daerah sebesar 67,27% yang termasuk kedalam kategori cukup baik. Dari tabel 4.39 di atas dapat diketahui Pemkot Bandung sudah memiliki karyawan dan staff yang mentaati peraturan-peraturan yang telah dibuat yang terlihat di dalam pelaporan LHKPN oleh Pejabat Eselon II telah mencapai 70%. Hal ini belum sesuai dengan capaian target kenyataannya yang tertera dalam program percepatan pemberantas korupsi. Terbukti dengan dengan mayoritas responden sebesar 59,46% menyatakan Pejabat Eselon II di lingkungan Pemkot Bandung sudah mentaati aturan-aturan dan ketetapan yang dibuat oleh pemerintah hanya mencapai "70 %", skor responden yang sebesar 32,43% menyatakan mencapai target "50%" dan sisanya 8,11% menyatakan < 50%.

**2. Penerapan dan Evaluasi Proses Pengendalian Anti-*Fraud***

*Fraud* tidak akan terjadi tanpa persepsi adanya kesempatan dan menyembunyikan perbuatannya organisasi hendaknya proaktif mengurangi kesempatan dengan mengidentifikasi dan mengukur resiko *fraud*, pengurangan resiko *fraud*, implementasi dan monitoring pengendalian intern pada Pemerintahan Kota Bandung. Secara menyeluruh, dilakukan rekapitulasi jumlah

skor tanggapan responden atas ketiga dimensi dan hasilnya dirangkum pada tabel berikut.

**Tabel 4.40**
**Rekapitulasi Skor Jawaban Responden Pada Aspek Penerapan dan Evaluasi Proses Pengendalian Anti-*Fraud***

| No | Dimensi | Skor Aktual | Skor Ideal | % | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mengidentifikasi dan mengukur resiko kecurangan | 65 | 110 | 59,09% | Cukup Baik |
| 2 | Pengurangan resiko kecurangan | 72 | 110 | 65,45% | Cukup Baik |
| 3 | Implementasi dan monitoring pengendalian intern | 76 | 110 | 69,09% | Cukup Baik |
| | **Total** | 213 | 330 | 64,55% | Cukup Baik |

Perhitungan: Skor Ideal = Jumlah pertanyaan * Nilai tertinggi * Jumlah Responden

Secara keseluruhan Penerapan dan Evaluasi Proses Pengendalian Anti-Fraud pada Pemerintah Kota Bandung termasuk dalam kategori cukup baik berdasarkan 3 indikator yang terdapat pada tabel 4.40. Hal ini sesuai dengan fenomena yang ada pada program percepatan pemberantasan korupsi dengan Inpres No. 5 Tahun 2004 sebagai landasannya yaitu masih kurangnya capaian target dari program tersebut. Berikut tanggapan responden pada masing-masing butir secara menyeluruh, dilakukan rekapitulasi jumlah skor tanggapan responden atas ketiga dimensi dan hasilnya dirangkum pada tabel berikut.

## A. Mengidentifikasi dan Mengukur Resiko Kecurangan

Mengidentifikasi dan mengukur resiko kecurangan berarti memiliki sikap kewaspadaan yang tinggi terhadap kemungkinan kelemahan pengendalian intern dengan melakukan serangkaian pengujian untuk menemukan indikator terjadinya *fraud* di dalam tubuh Pemerintahan Kota Bandung. Di bawah ini jawaban

responden mengenai mengidentifikasi dan mengukur resiko kecurangan., yaitu sebagai berikut:

**Tabel 4.41**
**Distribusi Jawaban Responden Mengenai Mengidentifikasi dan mengukur resiko kecurangan**

| No | Butir Kuesioner | | Skor Jawaban Responden | | | | | Jumlah Skor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 31 | Pengujian dalam menentukan fraud terhadap penyempurnaan sistem e-budgeting belum optimal dengan capaian : | f | 0 | 0 | 6 | 11 | 5 | 65 |
| | | % | - | - | 20,69% | 50,57% | 28,74% | 100% |
| **Persentase Total Skor Tanggapan Responden = 59,09%** | | | | | | | | |

Sumber : Data yang diolah, 2011

Persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal mengunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{65}{1x5x22} \text{ x}100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{65}{110} \text{ x}100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 59,09\%$$

Persentase total skor tanggapan responden mengenai kerugian daerah sebesar 59,09% yang termasuk kedalam kategori cukup baik. Dari tabel 4.40 di atas dapat diketahui Pemkot Bandung sudah memiliki Memiliki sikap kewaspadaan yang tinggi terhadap kemungkinan kelemahan pengendalian intern dengan melakukan serangkaian pengujian untuk menemukan indikator terjadinya *fraud*. Hal ini tidak sesuai dengan kenyataannya yang tertera dalam program percepatan pemberantas korupsi. Bahwa pengidentifikasian dan pengukuran resiko kecurangan dalam menentukan *fraud* terhadap penyempurnaan sistem e-

budgeting belum optimal dengan capaian 50 % dari 100%. Namun seiring berjalannya waktu hal itu bisa saja terjadi karena peruabahan yang dilakukan oleh Pemerintahan Kota Bandung untuk membenahi menjadi lebih baik. Terbukti dengan dengan skor tanggapan responden sebsar 50,57% menyatakan pengujian dalam menentukan fraud mencapai target < 50 %, skor responden yang sebesar 28,74% menyatakan mencapai target 30 % dan sisanya 20,69% menyatakan >50%.

## B. Pengurangan Resiko Kecurangan

Memastikan ketaatan terhadap kebijakan, rencana dan prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen dan memastikan seberapa jauh harta perusahaan dipertanggungjawabkan dan dilindungi dari kemungkinan terjadinya segala bentuk pencurian, kecurangan dan penyalahgunaan.

Di bawah ini jawaban responden mengenai pengurangan Resiko Kecurangan., yaitu sebagai berikut:

**Tabel 4.42**
**Distribusi Jawaban Responden Mengenai Pengurangan Resiko Kecurangan**

| No | Butir Kuesioner | | Skor Jawaban Responden | | | | | Jumlah Skor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 32 | Pencapaian ketaatan Pemkot terhadap kebijakan dalam penandatanganan Piagam Pakta Integritas masih sangat minim : | f | 0 | 3 | 10 | 9 | 0 | 72 |
| | | % | - | 8,33% | 41,67% | 50,00% | - | 100% |
| **Persentase Total Skor Tanggapan Responden = 65,45%** | | | | | | | | |

Sumber : Data yang diolah, 2011

Persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal mengunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{72}{1x5x22} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{72}{110} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 65{,}45\%$$

Persentase total skor tanggapan responden mengenai kerugian daerah sebesar 65,45% yang termasuk kedalam kategori cukup baik. Dalam tabel 4.41 menyatakan bahwa ketaatan terhadap kebijakan, rencana dan prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen dan memastikan seberapa jauh harta perusahaan dipertanggungjawabkan dan dilindungi dari kemungkinan terjadinya segala bentuk pencurian, kecurangan dan penyalahgunaan berjalan cukup baik namun belum sesuai dengan kenyataan yang terdapat di capaian target program percepatan pemberantasan korupsi. Dengan 83, 01 % Pejabat serta karyawan dan karyawati Pemkot Bandung belum menandatangani Piagam Pakta Integritas yang masih terbilang sangat minim. Hal tersebut dikarenakan adanya perubahan yang ingin dilakukan berupa pengoptimalisasian dari Pemerintahan Kota Bandung agar menjadi lebih baik. Terlihat bahwa dari tanggapan responden sebesar 50,00% menyatakan < 16 % ketaatan Pemkot terhadap kebijakan dalam penandatanganan Piagam Pakta Integritas, sebesar 41,67% menyatakan < 10 %.

## C. Implementasi dan monitoring pengendalian intern

Implementasi dan monitoring pengendalian intern berarti bahwa adanya pihak pengawasan yang memiliki pengetahuan akuntansi dan auditing yang dibantu dengan kemampuan penyidikan yang baik. Seperti auditor pada

Inspektorat Kota Bandung yang sudah terlatih ditunjang dengan pengalaman yang cukup.

Di bawah ini jawaban responden mengenai implementasi dan monitoring pengendalian intern., yaitu sebagai berikut:

**Tabel 4.43**
**Distribusi Jawaban Responden Mengenai Implementasi dan Monitoring Pengendalian Iintern**

| No | Butir Kuesioner | | Skor Jawaban Responden | | | | | Jumlah Skor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 33 | Pada Pemkot Bandung monitoring terhadap karyawan/ karyawati yang belum mengikuti BINTEK /DIKTAT Pengadaan Barang/ Jasa belum optimal : | f | 0 | 2 | 8 | 12 | 0 | 76 |
| | | % | - | 5,26% | 31,58% | 63,16% | - | 100% |
| **Persentase Total Skor Tanggapan Responden = 69,09%** | | | | | | | | |

Sumber : Data yang diolah, 2011

Persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal mengunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{76}{1x5x22} \text{ x } 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{76}{110} \text{ x } 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 69,09\%$$

Dari tabel 4.42 di atas dapat diketahui Persentase total skor tanggapan responden mengenai kerugian daerah sebesar 69,09% Pemkot Bandung sudah cukup mampu mengimplementasi dan monitoring pengendalian intern yang diterapkan kepada bawahan untuk meminimalisir terjadinya *fraud*, namun belum optimal karena 41,14 karyawan/ karyawati belum mengikuti BINTEK/ DIKLAT Pengadaan Barang/ Jasa.. Hal ini sesuai dengan fenomena dengan skor tanggapan

responden sebesar 63,16% menyatakan belum optimal, sebesar 31,58% menyatakan cukup optimal, dan 5,26% menyatakan optimal.

### 3. Pengembangan Proses Pengawasan (*Oversight Procecess*)

Pengembangan Proses Pengawasan (*Oversight Procecess*) berarti harus memiliki fungsi pengawasan yang tepat, pengawasan dalam berbagai jenis dan bentuk ini dapat dilaksanakan oleh berbagai pihak ini dapat dilaksanakan oleh berbagai pihak antar lain Komite audit, Manajemen, Internal auditor. Secara menyeluruh, dilakukan rekapitulasi jumlah skor tanggapan responden dengan satu dimensi dan hasilnya dirangkum pada tabel berikut.

**Tabel 4.44**
**Rekapitulasi Skor Jawaban Responden Pada Aspek Pengembangan Proses Pengawasan (*Oversight Procecess)***

| No | Dimensi | Skor Aktual | Skor Ideal | % | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Pengembangan Proses Pengawasan (*Oversight Procecess)*** | 69 | 110 | 62,73% | Cukup Baik |
| | **Total** | **69** | **110** | **62,73%** | Cukup Baik |

Perhitungan: Skor Ideal = Jumlah pertanyaan * Nilai tertinggi * Jumlah Responden

Secara keseluruhan Pengembangan Proses Pengawasan (*Oversight Procecess*) pada Pemerintah Kota Bandung termasuk dalam kategori baik berdasarkan 3 indikator yang terdapat pada tabel 4.40. Berikut tanggapan responden pada masing-masing butir secara menyeluruh, dilakukan rekapitulasi jumlah skor tanggapan responden atas ketiga dimensi dan hasilnya dirangkum pada tabel berikut.

Di bawah ini jawaban responden mengenai Pengembangan Proses Pengawasan (*Oversight Procecess*)., yaitu sebagai berikut:

**Tabel 4.45**
**Distribusi Jawaban Responden Mengenai Pengembangan Proses Pengawasan (*Oversight Procecess*)**

| No | Butir Kuesioner | | Skor Jawaban Responden | | | | | Jumlah Skor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 33 | Pada Pemkot Bandung monitoring terhadap karyawan/ karyawati yang belum mengikuti BINTEK /DIKTAT Pengadaan Barang/ Jasa belum optimal : | f | 0 | - | 8 | 10 | 1 | 69 |
| | | % | - | - | 34,78% | 57,97% | 7,25% | 100% |
| **Persentase Total Skor Tanggapan Responden = 62,73%** | | | | | | | | |

Sumber : Data yang diolah, 2011

Persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal mengunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{73}{1x5x22} \text{ x } 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{73}{110} \text{ x } 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 62,73\%$$

Dari tabel 4.44 di atas dapat diketahui Persentase total skor tanggapan responden Pengembangan Proses Pengawasan (*Oversight Procecess*) sebesar 62,73% yang dapat dikategorikan cukup baik. Pada dasarnya Pemerintahan Kota Bandung harus memiliki fungsi pengawasan yang tepat, pengawasan dalam berbagai jenis dan bentuk ini dapat dilaksanakan oleh berbagai pihak ini dapat dilaksanakan oleh berbagai pihak antar lain Komite audit, Manajemen, Internal auditor. Pernyataan responden sesuai dengan fenomena yang ada pada capaian program percepatan pemberantasan korupsi yaitu SATGAS penerapan SPIP di lingkungan Pemkot Bandung baru mencapai 80%. Hal ini terlihat dari tanggapan responden sebesar 57,97% menyatakan bahwa pengawasan eksternal maupun

internal dalam pembentukan SATGAS untuk mewujudkan penerapan SPIP sudah baik sebesar 80 %, sedangkan 34,78% menyatakan <80 % dan sisanya 7,25% menyatakan 70%.

### 4.4. Analisis Verifikatif

Analisis verifikatif (kuantitatif) digunakan untuk menyajikan hasil penelitian dalam bentuk angka-angka yang merupakan hasil dari pengolahan data penelitian. Dalam penelitian ini analisis verifikatif yang digunakan yaitu :

#### 4.4.1 Analisis Regresi Linier Sederhana

Analisis regresi linier sederhana adalah alat analisis yang digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). Dampak dari analisis regresi dapat digunakan untuk memutuskan apakah naik dan menurunnya variabel dependen (pencegahan *fraud*) dapat dilakukan melalui menaikkan dan menurunkan keadaan variabel independen (pengendalian intern). Atau dengan meningkatkan keadaan variabel dependen (pencegahan *fraud*) dapat dilakukan dengan meningkatkan variabel independen (pengendalian intern). Dengan formulasi sebagai berikut :

$$\mathbf{Y = a + bx}$$

Dimana nilai a dan b dicari terlebih dahulu dengan menggunakan persamaan sebagai berikut :

$$a = \frac{\left(\sum X^2\right)\left(\sum Y\right) - \left(\sum X\right)\left(\sum XY\right)}{n\sum X^2 - \left(\sum X\right)^2}$$

$$b = \frac{n\sum XY - \left(\sum X\right)\left(\sum Y\right)}{n\sum X^2 - \left(\sum X\right)^2}$$

**Sumber : Jonathan (2005 : 73)**

Keterangan:

a = Konstanta ( nilai Y pada saat nol)
b = Koefisien regresi
X = Nilai variabel independen (pencegahan *fraud*)
Y = Nilai variabel dependen (pengendalian intern)
N = Banyaknya sampel

Berikut ini hasil $r_s$ yang diperoleh dengan menggunakan *SPSS 19.0 for windows* :

**Tabel 4.46**
**Uji Anova Untuk Pengaruh Pengendalian Intern Terhadap Pencegahan Fraud**

**ANOVA[b]**

| Model | | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Regression | 1801,916 | 1 | 1801,916 | 99,509 | ,000[a] |
| | Residual | 362,163 | 20 | 18,108 | | |
| | Total | 2164,079 | 21 | | | |

a. Predictors: (Constant), total_X

b. Dependent Variable: total_Y

**Sumber : Data Primer yang diolah, 2011**

**Tabel 4.47**
**Koefisien Regresi Sederhana Pengendalian Intern Terhadap Pencegahan Fraud**

**Coefficients[a]**

| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 | (Constant) | ,799 | 3,097 | | 9,039 | ,000 |
| | total_X | ,987 | ,199 | ,912 | 9,975 | ,000 |

a. Dependent Variable: total_Y

**Sumber : Data Primer yang telah diolah, 2011**

Dari tabel diatas dibentuk persamaan regresi linier sebagai berikut :

**Y = 0,799 + 0,987 X**

Keterangan :

- Dari uji ANOVA atau uji F test, dengan pendekatan probabilitas tingkat signifikan 0,000 di bawah nilai 0,05; maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel X.
- Tabel selanjutnya menggambarkan persamaan regresi yaitu Y = 0,799 + 0,987 X. Koefisien regresi menyatakan bahwa setiap penambahan nilai 1 maka pengendalian intern akan meningkatkan pencegahan *fraud.*

### 4.4.2 Analisis Korelasi *Pearson*

Analisis koefisen korelasi *pearson* digunakan untuk mengukur ada atau tidaknya hubungan linier antara variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y) serta mempunyai tujuan untuk meyakinkan bahwa pada kenyataannya terdapat pengaruh antara pengendalian intern terhadap pencegahan *fraud*. Dengan formulasi sebagai berikut :

$$r = \frac{n(\sum XY) - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\left\{n\left(\sum X^2\right) - \left(\sum X\right)^2\right\}\left\{n\left(\sum Y^2\right) - \left(\sum Y\right)^2\right\}}}$$

**Sumber : Sugiyono (2007 : 274)**

Keterangan :

r = Koefisien Korelasi

n = Jumlah Tahun Yang di Hitung

X = Variabel Bebas (Independen)

Y = Variabel Terikat (Dependen)

Angka korelasi berkisar antara 0 sampai dengan 1. Besarnya kecilnya angka korelasi menentukan kuat atau lemahnya hubungan kedua variabel. Keeratan variabel dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Koefisien korelasi mempunyai nilai $-1 \leq r \leq +1$ dimana:

- Apabila r = +1, maka korelasi antara kedua variabel dikatakan sangat kuat dan searah, artinya jika X naik sebesar 1 maka Y juga akan naik sebesar 1 atau sebaliknya.
- Apabila r = 0, maka hubungan antara kedua variabel sangat lebar atau tidak ada hubungan sama sekali.
- Apabila r = -1, maka korelasi antara kedua variabel sangat kuat dan berlawanan arah, artinya apabila X naik sebesar 1 maka Y akan turun sebesar 1 atau sebaliknya.

Jika dihitung menggunakan program *SPSS V. 19.0 for windows* maka :

**Tabel 4.48**
**Korelasi Variabel**

**Correlations**

| | | VAR00001 | total_X | total_Y |
|---|---|---|---|---|
| VAR00001 | Pearson Correlation | 1 | -,356 | -,365* |
| | Sig. (1-tailed) | | ,052 | ,048 |
| | N | 22 | 22 | 22 |
| total_X | Pearson Correlation | -,356 | 1 | ,912** |
| | Sig. (1-tailed) | ,052 | | ,000 |
| | N | 22 | 22 | 22 |
| total_Y | Pearson Correlation | -,365* | ,912** | 1 |
| | Sig. (1-tailed) | ,048 | ,000 | |
| | N | 22 | 22 | 22 |

*. Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).

**Sumber : Data Primer yang diolah, 2011**

Keterangan :

- Hubungan / korelasi antara variabel pengendalian intern ditentukan dengan nilai *pearson* sebesar 0,912 mendekati angka satu; yang berarti hubungan kedua variabel tersebut sangat erat / kuat, serta tanda positif yang berarti semakin besar pengendalian intern dilaksanakan semakin kuat *fraud* dapat dicegah.
- Tingkat signifikan koefisien korelasi satu sisi (1-tiled) diukur dari nilai probabilitas (alpha) maka angka 0,000 menunjukkan jauh dibawah 0,05 yang berarti korelasi antara variabel tersebut signifikan (nyata).

### 4.4.3 Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi merupakan besaran untuk menunjukkan tingkat kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih dalam bentuk persen atau dengan kata lain seberapa besar X dapat memberikan kontribusi terhadap Y.

Dalam analisis korelasi terdapat suatu angka yang disebut dengan koefisien determinasi yang sering disebut koefisien penentu, karena besarnya adalah kuadrat dari kofisien korelasi (r ), sehingga koefisien ini berguna untuk mengetahui besarnya kontribusi pengaruh pengendalian intern terhadap pencegahan *fraud*. Jika $r^2$ = 100% berarti variable independent berperan sempurna terhadap variable dependent, demikian sebaliknya jika $r^2$ = 0 berarti variable independent tidak berperan terhadap variable dependent.

Besarnya koefisien determinasi dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\mathbf{Kd = (r^2) \times 100\%}$$

**Sumber: Umi Narimawati (2010 : 50)**

**Keterangan:**

Kd = Koefisien determinasi

r = Koefisien korelasi

Menurut hasil pengolahan data menggunakan program *SPSS V .19.0 for windows* menggambarkan sebagai beikut.

**Tabel 4.49**
**Koefisien Determinasi Pengendalian Intern Terhadap Pencegahan Fraud**

**Model Summary[b]**

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ,912[a] | ,833 | ,824 | 1,95442 |

a. Predictors: (Constant), total_X

b. Dependent Variable: total_Y

**Sumber : Data Primer yang diolah, 2011**

Pada hasil perhitungan di atas terlihat bahwa R square menunjukkan 0,833 (hasil kuadrat dari nilai R / koefisien korelasi); perhitungan di atas mengandung arti bahwa 83,3% pencegahan *fraud* dapat dijelaskan dengan pengendalian intern. Sedangkan selisihnya 16,7% dijelaskan oleh meningkatkan keefektifan pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi, moralitas manajemen, serta menghilangkan asimetris informasi.

### 4.4.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan pada alat statistik yang digunakan dan hipotesis penelitian di atas maka penulis menetapkan dua hipotesis yang digunakan untuk uji statistiknya yaitu hipotesis nol (Ho) yang diformulasikan untuk ditolak dan hipotesis alternatif ($H_a$) yaitu hipotesis penulis yang diformulasikan untuk diterima, dengan perumusan sebagai berikut :

Ho: $\rho = 0$, Tidak ada peranan yang signifikan antara variabel pengendalian intern dan variabel pencegahan *fraud* pada Pemerintahan Kota Bandung.

Ha: $\rho \neq 0$, Ada peranan yang signifikan antara variabel variabel pengendalian intern dan variabel pencegahan *fraud* pada Pemerintahan Kota Bandung.

**A. Uji signifikansi**

Menurut hasil pengolahan data menggunakan program *SPSS V .19.0 for windows* menggambarkan sebagai beikut :

**ANOVA[b]**

| Model | | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Regression | 1801,916 | 1 | 1801,916 | 99,509 | ,000[a] |
| | Residual | 362,163 | 20 | 18,108 | | |
| | Total | 2164,079 | 21 | | | |

a. Predictors: (Constant), total_Y

b. Dependent Variable: total_X

**Sumber : Data Primer yang diolah, 2011**

Coefficientsa

| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 | (Constant) | 27,999 | 3,097 | | 9,039 | ,000 |
| | total_Y | 1,987 | ,199 | ,912 | 9,975 | ,000 |

a. Dependent Variable: total_X

**Sumber : Data Primer yang diolah, 2011**

**a. Dengan menggunakan uji statistik**

T hitung dari tabel output terlihat bahwa t hitung adalah 0,9039 ; T table dengan alpha = 5 %, df= N-2 = 22-2 =20 menggunakan rumus statistik uji t sebagai berikut :

$$t_{hitung} = \frac{r_s\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r_s^{\,2}}}$$

**Sumber : Umi Narimawati ( 2010 : 42)**

**Keterangan :**

t = uji t

r = koefisien korelasi *pearson*

n = banyaknya subjek atau responden

Dengan menggunakan rumus tersebut dapat diketahui apakah hipotesis penelitian yaitu pengendalian intern berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dapat terbukti. Hasil perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$t_{hitung} = \frac{0{,}912\sqrt{22-2}}{\sqrt{1-(0{,}912)^2}}$$

$$t_{hitung} = \frac{0{,}912(4{,}4721)}{0{,}41231}$$

$$t_{hitung} = \frac{4{,}07858}{0{,}41231}$$

$$t_{hitung} = \mathbf{9{,}8920}$$

Berdasarkan perhitungan diatas, maka dapat diketahui bahwa besarnya $t_{hitung}$ adalah 9,8920 dengan menggunakan taraf signifikansi 5% dan jumlah responden 22, maka dapat diketahui bahwa besarnya $t_{tabel}$ adalah 2,08596.

**b. Menentukan Penerimaaan Hipotesis**

Berdasarkan perbandingan antara $t_{hitung}$ dan $t_{tabel}$ maka dapat diketahui bahwa $t_{hitung}$ lebih besar daripada $t_{tabel}$ yaitu 2, 08596. Hal ini menunjukkan bahwa $H_o$ ditolak dan $H_1$ diterima dengan mengacu pada kriteria dibawah ini:

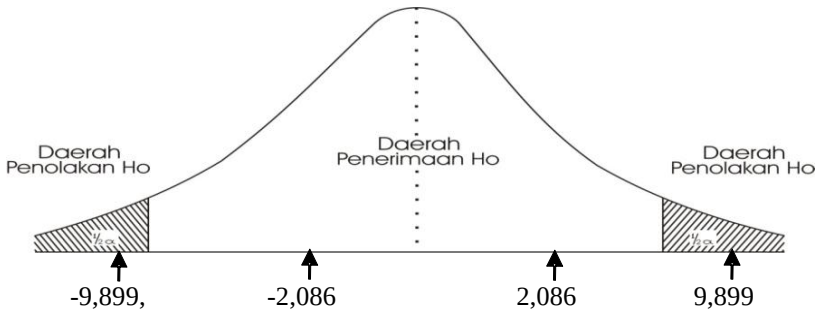
Jika $t_{hitung}$ > dari $t_{tabel}$, maka $H_0$ ditolak, $H_1$ diterima

Jika $t_{hitung}$ < dari $t_{tabel}$, maka $H_0$ diterima, $H_1$ ditolak

Artinya bahwa pengendalian intern berpengaruh secara signifikan terhadap pencegahan *fraud*..

**c. Menggambarkan Daerah Penerimaan Hipotesis**

Maksud dari penggambaran mengenai daerah penerimaan hipotesis adalah untuk mengetahui apakah hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini diterima atau ditolak.




**Gambar 4.1**
**(Uji Dua Belah Pihak Daerah Penerimaan dan Penolakan Hipotesis)**

**d. Penarikan Kesimpulan**

Dari semua perhitungan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat korelasi yang signifikan antara pengendalian intern dengan pencegahan *fraud*, artinya apabila pengendalian intern telah terlaksana dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsipnya maka pencegahan *fraud* pun dapat dilakukan dengan baik pula yang mana dibuktikan dengan besarnya $t_{hitung}$ lebih besar daripada $t_{tabel}$ yaitu 9,89 > 2,086. Hal ini membuktikan bahwa hipotesis penelitian diterima, artinya

pengendalian intern mempunyai pengaruh yang signifikan dan positif terhadap pencegahan *fraud.* Dari perhitungan koefisien determinasi didapat pada hasil perhitungan di atas terlihat bahwa R square menunjukkan 0,833 (hasil kuadrat dari nilai R / koefisien korelasi); perhitungan di atas mengandung arti bahwa 83,3% pencegahan *fraud* dapat dijelaskan dengan pengendalian intern. Sedangkan selisihnya 16,7% dijelaskan oleh sebab-sebab yang lainnya seperti ketaatan akuntansi, moralitas manajemen, dan menghilangkan asimetri informasi. (Wilopo, 2008